Kemenkes
BKK Merauke

LAKIP TAHUN 2025

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

www.bkkmerauke.com
kkpmrk@gmail.com
082199224855 / (0971) 330263
Jl. Prajurit Merauke

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke periode Tahun 2025 dapat tersusun, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan kepada Tim Lakip dansemua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan atau pencapaian kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai pertanggungjawaban Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit atas pertanggungjawaban dan keberhasilan dalam melaksanakan program/kerja sampai tahun 2025 melalui beberapa indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Laporan Akuntabilitas kinerja ini merupakan evaluasi kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja selanjutnya. Laporan ini juga memuat aspek keuangan yang secara langsung berhubungan dengan hasil (output) dalam rangka mendukung kerja manajerial di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pihak yang berkompeten guna peningkatan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada tahun berikutnya.

Merauke, 19 Januari 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Merauke

Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si., M.K.M.
NIP 197305161997031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 yang menjelaskan pencapaian target indikator-indikator sebagaimana telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja kegiatan masing-masingprogram diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan turunan dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (P2) yang dalam prakteknya terdapat 8 (delapan) Indikator yang kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke. Dari 8 (delapan) indikatoryang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025, seluruh indikator mencapai/melebihi target 100% dengan rincian sebagai berikuit:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pintu Pelabuhan/Bandara/PLBN telah tercapai indeks 1 dari target indeks 0,99 sehingga capaian kinerjanya sebesar 101%
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah tercapai 100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Pelabuhan/Bandara/PLBN telah tercapai indeks 1 dari target indeks 0,92 sehingga capaian kinerjanya sebesar 109%
4. Nilai kinerja anggaran sebesar telah tercapai 97,50 dari target 87 sehingga capaian kinerjanya sebesar 112%
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran telah tercapai 95 dari target 96,98 sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%
6. Kinerja Implementasi WBK satker telah tercapai 97,06 dari target 80 sehingga capaian kinerjanya sebesar 121%
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya telah tercapai 97,22% dari target 80% sehingga capaian kinerjanya sebesar 122%
8. Persentase anggaran telah tercapai 97,57% dari target 96% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102%

Rata-rata capaian target 8 indikator tahun 2025 adalah 109 %, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian target tahun 2024 adalah 108%, yang berarti terdapat peningkatan kinerja di tahun 2025.

kegiatan ini didukung dari sumber daya anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan

Kelas II Merauke yang bersumber dari rupiah murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 8.954.090.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.736.241.530 (97,57%)

Hasil yang telah dicapai di Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai dasar untuk melanjutkan pelaksanaan program dan menjadi pedoman agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang hasilnya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada tahun berikutnya, diharapkan parapelaksana program melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas perencanaan, lebih mencurahkan konsentrasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, selaluberkoordinasi untuk peningkatan jejaring kerja, baik dengan lintas program dan lintas sektor serta kegiatan yang terarah dan berkesinambungan.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR……..	i
RINGKASAN EKSEKUTIF……...	ii
DAFTAR ISI……	iv
DAFTAR SINGKATAN/DEFENISI/ISTILAH……..	v
DAFTAR TABEL……	vi
DAFTAR GRAFIK……...	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I.PENDAHULUAN……..…	1
A. Latar Belakang……...…	1
B. Maksud dan tujuan.....	4
C. Tugas pokok dan fungsi.....	4
D. Struktur organisasi.....	5
E. Sumber Daya Manusia	13
F. Sistimatika Penulisan.....	18
BAB II.PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	19
A. Perencanaan Kinerja……...	19
B Perjanjian Kinerja	21
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA……...	24
A. Pengukuran Kinerja……...	24
B Sumber Daya Anggaran	89
C Sumber Daya Sarana dan Prasarana ……..	94
BAB IV.PENUTUP	95
A Kesimpulan……...	95
B. Tindak Lanjut	95

DAFTAR SINGKATAN/DEFINISI/ISTILAH

BKK	:	Balai Kekarantinaan Kesehatan
PLBN	:	Pos Lintas Batas Negara, merupakan pintu masuk melalui darat disuatu Negara
Direktorat Jenderal P2	:	Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
Vektor	:	Serangga atau hewan lain yang biasanya membawa bibit penyakit yang merupakan suatu risiko bagi kesehatan masyarakat
Alat angkut	:	Pesawat udara, kapal laut, kereta api, kendaraan bermotor atau alat angkut lainnya yang digunakan dalam melakukan perjalanan internasional
Pelabuhan	:	Pelabuhan laut atau pelabuhan yang terletak pada sungai dan danau, tempat kapal yang melakukan perjalanan datang dan berangkat.
PHEIC	:	Public Health Emergency of International Concern, merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia
Karantina	:	Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit. Pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lainnya, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi
Sanitasi	:	suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perencanaan kinerja BKK Merauke tahun 2025-2029 19
Tabel 2.2 Rencana kinerja tahun 2025 20
Tabel 2.3 Perjanjian kinerja tahun 2025 21
Tabel 3.1 Capaian kinerja triwulan III tahun anggaran 2025 23
Tabel 3.2 Parameter pengukuran indeks faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN 25
Tabel 3.3 Perbandingan target dengan realisasi indikator indeks faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN 26
Tabel 3.4 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 26
Tabel 3.5 Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja indikator deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target jangka akhir (RAK 2025-2029) 29
Tabel 3.6 Tabel perhitungan Nilai Efisiensi 34
Tabel 3.7 Faktor risiko yang dikendalikan 35
Tabel 3.8 Faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan 36
Tabel 3.9 Realisasi kinerja persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2025 dengan standar nasional 38
Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan dengan BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari, dan BKK Kelas II Sampit 39
Tabel 3.11 Perhitungan nilai efisiensi 39
Tabel 3.12 Rekap realisasi kinerja pada indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk pada tahun 2025 45
Tabel 3.13 Rekap capaian kinerja pada indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk pada tahun 2025 48
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 49
Tabel 3.15 perbandingan realisasi kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN tahun 2025 yangdibandingkan dengan target jangka akhir (RAK 2025-2029) 51
Tabel 3.16 Tabel perhitungan nilai efisienai 57

Tabel 3.17 Capaian indikator nilai kinerja anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 59
Tabel 3.18 Realiasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Akhir (RAK 2025-2029) 60
Tabel 3.19 Tabel perhitungan nilai efisienai 64
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Indikator Nilai Kinerja Anggaran ……. 66
Tabel 3.21 Tabel perhitungan nilai efisiensi 71
Tabel 3.22 Tabel hasil assessment Eselon I 73
Tabel 3.23 Tabel perhitungan nilai efisiensi 78
Tabel 3.24 Perbandingan jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya dibandingkan dengan standar nasional 81
Tabel 3.25 Tabel perhitungan nilai efisiensi 84
Tabel 3.26 Tabel perhitungan nilai efisiensi 89
Tabel 3.27 Realisasi belanja persumber dana 90
Tabel 3.28 Persentase realisasi anggaran perbulan 90
Tabel 3.29 Realisasi anggaran menurut rincian output (KRO/RO) 91
Tabel 3.30 Realisasi anggaran menurut indikator kinerja kegiatan tahun 2025 92
Tabel 3.31 Neraca Sarana dan Prasarana 94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Distribusi ASN berdasarkan jabatan 12

Grafik 1.2 Rincian tenaga outsourcing berdasarkan alokasi penerimaan 13

Grafik 1.3 Distribusi ASN dan Honorer beradasarkan wilayah kerja 14

Grafik 1.4 Distribusi pegawai berdasarkan golongan 15

Grafik 3.1 Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 27

Grafik 3.2 Target dan realisasi pemeriksaan orang, alat angkut barang dan lingkungan tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 28

Grafik 3.3 Grafik perbandingan target dan realisasi kinerja indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN 29

Grafik 3.4 Perbandingan realisasi indeks deteksi dini faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN tahun 2025 antara BKK Merauke , BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit 31

Grafik 3.5 Perbandingan persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan tahun sebelumnya 36

Grafik 3.6 Perbandingan realisasi kinerja persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2025 dengan target jangka akhir (RAK 2025-2029) 37

Grafik 3.7 Perbandingan target dan realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN tahun 2025 49

Grafik 3.8 Perbandingan realisasi kinerja indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 50

Grafik 3.9 Perbandingan indikator indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBN BKK Merauke , BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit 52

Grafik 3.10 Target dan realisasi kinerja indikator nilai kinerja anggaran tahun 2025 59

Grafik 3.11 Perbandingan realisasi kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2025 dengan standar nasional 61

Grafik 3.12 Realisasi nilai kinerja anggaran BKK Merauke , BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit 61
Grafik 3.13 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 66
Grafik 3.14 Realisasi kinerja indikator pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 66
Grafik 3.15 Perbandingan realisasi kinerja indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan target jangka akhir (RAK 2025-2029)..... 67
Grafik 3.16 Realisasi kinerja indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 dengan standar nasional 68
Grafik 3.17 Realisasi kinerja indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 anggaran BKK Merauke , BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit 69
Grafik 3.18 Perbandingan target dengan realisasi implementasi WBK tahun 2025 73
Grafik 3.19 Perbandingan realisasi kinerja implementasi WBK tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 74
Grafik 3.20 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka akhir (RAK 2025-2029) 75
Grafik 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK tahun 2025 BKK Merauke dibandingkandengan BKK Kelas II Biak , BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit..... 79
Grafik 3.22 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya tahun 2025 79
Grafik 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 80
Grafik 3.24 Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 dengan Target Jangka Akhir (RAK 2025-2029) 81
Grafik 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya BKK Merauke dengan BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit..... 82
Grafik 3.26 Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase

Realisasi Anggaran Tahun 2025 85
Grafik 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya 85
Grafik 3.28 Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase relisasi anggaran Tahun 2025 dengan jangka Akhir (RAK 2025-2029) 86
Grafik 3.29 Perbandingan persentase realisasi anggaran Tahun 2025 BKK Merauke yang dibandingkan dengan BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit 87
Grafik 3.30 Realisasi anggaran setiap bulan 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
Gambar 1.2	Peta Wilayah Kerja BKK Merauke	5
Gambar 1.3	Wilker Pelabuhan Laut Agats	6
Gambar 1.4	Wilker Pelabuhan Laut Bade	6
Gambar 1.5	Wilker Pelabuhan Laut Wanam	7
Gambar 1.6	Wilker PLBDN Sota	8
Gambar 1.7	Wilker PLBN Yetetkun	9
Gambar 1.8	Pos Bandara Tanah Merah	10
Gambar 1.9	Pos Pelabuhan Laut Merauke	10
Gambar 1.10	Wilker Bandara Mopah Merauke	11
Gambar 3.1	Nilai Kinerja Anggaran dari dashboard SMART Kemenkeu RI	58

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, tanggal 1 Januari 2024, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke berubah menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan unit pelaksana teknis (UPT) bidang kekarantinaan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan yang melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara (PLBDN).

Sesuai Permenkes 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta amanat *International Health Regulation* (IHR) Tahun 2005, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke wajib menjaga Pelabuhan/Bandara/PLBDN dari ancaman kesehatan masyarakat. Berkaitan dengan upaya cegah tangkal penyakit, terdapat beberapa isu strategis di Papua Selatan yaitu :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mewajibkan seluruh kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/706/2025 tentang Strategi Pengendalian Belanja dalam Rangka Efisiensi Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025. surat Edaran tersebut berlaku bagi pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pimpinan satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis, serta seluruh pegawai di lingkungan Kemenkes. Efisiensi anggaran

mulai diterapkan pada tanggal 25 Februari 2025 dan berlaku untuk semua sumber pendanaan, termasuk Rupiah Murni (RM), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Badan Layanan Umum (BLU), dan Hibah Dalam Negeri (HDN). Kebijakan ini berlaku di seluruh unit kerja dan satuan kerja Kemenkes, baik di kantor pusat maupun di daerah. Adapun strategi pengendalian belanja dalam rangka efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

a) pembatasan belanja operasional;
b) pembatasan operasional sarana prasarana pendukung kantor;
c) pembatasan kendaraan dinas;
d) pembatasan belanja perjalanan dinas.

Bala Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal penanggulangan Penyakit melakukan penghematan/ Efisiensi anggaran belanja sebesar Rp1.949.215.000. Kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi BKK Merauke untuk menggunakan anggaran yang diberikan secara efektif untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan tetap mencukupi kebutuhan operasional maupun non operasional di BKK Merauke.

2. Pemberlakuan vaksin polio tujuan Arab Saudi

Berdasarkan *Health Requirements and Recommendations For Travelers to Saudi Arabia for Umrah and Visit during* 1446 H (2025) *dan Health Requirements and Recommendations For Travelers to Saudi Arabia for Hajj* 1446 H (2025) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi, telah ditetapkan kebijakan bahwa pelaku perjalanan dari Indonesia diwajibkan mendapatkan imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis untuk jemaah haji, serta imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis untuk jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi. Oleh karenanya jemaah haji dan umrah serta pelaku perjalanan ke Arab Saudi asal Indonesia diwajibkan mendapatkan imunisasi sebagaimana kebijakan Pemerintah Arab Saudi maka Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/A/1206/2025 Tentang Pelaksanaan Imunisasi Bagi Jemaah Haji dan Umroh tanggal 25 april 2025 dimana UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas untuk :

a) melaksanakan sosialisasi kepada penyelenggara ibadah haji dan umrah, jemaah haji dan umrah, dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi tentang pentingnya imunisasi Meningitis Meningokokus, COVID-19, dan Poliomyelitis;

b) melaksanakan pembinaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional pada wilayah kerjanya;

c) melaksanakan pengawasan terhadap jemaah haji dan umrah, serta pelaku perjalanan ke atau dari Arab Saudi pada saat keberangkatan dan saat kepulangan, dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan melaksanakan layanan vaksinasi internasional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Pelaksanaan imunisasi Meningitis Meningokokus dan Poliomyelitis bagi jemaah umrah dan pelaku perjalanan ke Arab Saudi dapat dilakukan secara mandiri di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional. Sejak Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengeluarkan persyaratan dan rekomendasi kesehatan bagi jamaah haji tahun 1446/2025, banyak pengguna jasa/jamaah umroh yang datang ke BKK Kelas II Merauke untuk melakukan vaksinasi, namun jumlah stock vaksin Poliomyelitis sangat terbatas karena dropping dari pusat belum ada, sehingga banyak jemaah yang melakukan vaksinasi di fasyankes lainnya yang menyediakan vaksin poliomyelitis.

3. Salah satu ancaman penyakit yang tidak dapat diabaikan adalah ancaman penyakit menular langsung, diantaranya adalah malaria. Berdasarkan data kasus malaria pada pertengahan tahun 2025 (hingga 17 Juni 2025), tercatat 22.500 kasus malaria di Papua Selatan. Kasus malaria di wilayah Papua Selatan masih tinggi, dengan angka *Annual Paracite Incidence* (API) > 10 (endemisitas tinggi), hal ini menunjukkan bahwa transmisi malaria masih aktif terjadi di Papua Selatan. Adapun yang menjadi strategi dan terobosan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2025 adalah melaksanakan penemuan kasus yang dilaksanakan berbarengan dengan pengendalian vektor, seperti larvasida, manajemen lingkungan, dan penyemprotan residu dalam ruangan serta melakukan skrining malaria di pintu masuk. Data malaria di Papua Selatan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa provinsi ini menyumbang sekitar 10% dari total kasus malaria di Indonesia. Dinas Kesehatan Papua Selatan mencatat bahwa angka ini menunjukkan perlunya kewaspadaan tinggi terhadap penyakit malaria. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke turut mendukung upaya eliminasi malaria dengan melakukan skrining malaria di Pelabuhan/Bandara/PLBDN, mencatat dan melaporkan

penemuan kasus. Diharapkan dengan data surveilans yang baik dan tervalidasi akan mendapat gambaran yang tepat terkait beban dan penyebaran kasus malaria sampai pada level kelurahan/kampung, termasuk di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

4. Data kasus HIV di Papua Selatan untuk tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan, dengan data spesifik untuk Kabupaten Merauke tercatat 91 kasus baru hingga Mei 2025 dan total 133 kasus HIV & AIDS antara Januari dan Agustus 2025. Angka ini melengkapi data akumulasi yang telah mencapai 3049 kasus di Merauke sejak 1992. Dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mencegah dan menanggulangi penyakit HIV maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke melaksanakan skrining HIV di pintu masuk dengan melakukan pemeriksaan bagi masyarakat dan pengguna jasa di sekitar wilayah kerja BKK Merauke.
5. Program Cek Kesehatan Gratis merupakan kebijakan nasional pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dasar kepada masyarakat secara gratis di fasilitas kesehatan. Tujuan utamanya adalah mendorong deteksi penyakit tidak menular (seperti hipertensi, diabetes) dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan dasar yang mudah diakses secara gratis. BKK Merauke melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis di pintu masuk Negara namun ada beberapa point isu strategis/kendala dampak dari Kegiatan CKG yaitu :
   - Kegiatan CKG berpotensi memperluas ruang lingkup layanan BKK dari pengawasan faktor risiko kesehatan menjadi pelayanan kesehatan individual, sehingga memerlukan penguatan kebijakan internal agar tidak mengurangi efektivitas fungsi pengendalian penyakit lintas wilayah dan lintas negara.
   - Pelaksanaan CKG di BKK memerlukan koordinasi yang kuat dengan Dinas Kesehatan daerah, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, BPJS Kesehatan, serta pengelola pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara. Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kejelasan alur rujukan pasca pemeriksaan menjadi isu strategis yang dapat memengaruhi keberlanjutan pelayanan dan tindak lanjut hasil CKG.
   - Penetapan target kinerja CKG yang berorientasi pada jumlah capaian peserta berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga mutu pelayanan dan kedalaman pemeriksaan kesehatan. Kondisi ini menjadi isu strategis dalam konteks akuntabilitas kinerja, khususnya dalam

memastikan bahwa capaian output sejalan dengan peningkatan kualitas deteksi dini dan perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah kekarantinaan.

6. PLBN Yetetkun berada di Kampung Yetetkun, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Pos Lintas Batas Negara ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini. PLBN Yetetkun bukan hanya gerbang masuk tetapi merupakan sumber kedaulatan dan pusat pertumbuhan. Secara fungsi PLBN berperan ganda sebagai penjaga keamanan yang mengawasi masuknya orang dan barang, sekaligus mendorong ekonomi lokal. Dengan terintegrasi PLBN Yetetkun juga berfungsi sebagai simpul konektifitas yang mempermudah pergerakan masyarakat serta mempermudah hubungan bilateral dengan negara tetangga Papua Nugini. PLBN Yetetkun sebaga titik pemeriksaan kekarantinaan, keimigrasian dan bea cukai (CIQ), petugas CIQ memastikan setiap orang dan barang yang melintas sesuai dengan aturan yang berkaku sehingga dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dalam melakukan tugas dan fungsi di pintu masuk, pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke berupaya melakukan cegah tangkal penyakit di pintu masuk dengan melakukan layanan kekarantinaan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah dengan jarak tempuh 530 km dan waktu tempuh 11 jam serta lokasi PLBN Yeterkun yang berada di lokasi yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat maka terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

   - Keamanan terbatas

     Belum adanya Pos TNI dan Polri membuat pengamanan di perbatasan belum optimal.
   - Infrastruktur Pendukung

     Akses jalan, jembatan, dan pemancar telekomunikasi masih perlu pembenahan agar operasional maksimal.
   - Penyelundupan

     Adanya kerawanan terkait peredaran barang ilegal, seperti ganja, di area tersebut.
   - Tidak adanya tunjangan khusus perbatasan bagi pegawai yang bertugas di PLBN Yetetkun

   Untuk itu perlunya percepatan pemenuhan sarana, prasarana dan anggaran pendukung untuk meningkatkan operasional dan pengawasan di PLBN Yetetkun.

B. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke secara tertulis, untuk mengetahui pencapaian program/kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2025 , yang harus dipertanggungjawabkan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke kepada Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang menyebutkan Klasifikasi Bidang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II dan Loka Kekarantinaan Kesehatan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Bidang Kekarantinaan Kesehatan

UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempuyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

2. Fungsi Bidang Kekarantinaan Kesehatan

a. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan padaalat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
c. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alatangkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan;
d. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko Kesehatan pada alatangkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan;
e. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
f. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
g. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan Kesehatan;
h. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang

kekarantinaanKesehatan;

i. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan Kesehatan;

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kekarantinaanKesehatan; dan

k. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan.

D. Struktur Organisasi

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke terletak di Jl. Prajurit No. 01 Merauke Provinsi Papua Selatan, berdasarkan struktur organisasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke terdiri dari:

1. Kepala Balai
2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
3. Kelompok jabatan fungsional
4. Instalasi

Gambar 1.1
Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, maka ditetapkan susunan Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan (jabatan fungsional epidemiolog);
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut

dan Barang (jabatan fungsional epidemiolog);

3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan (jabatan fungsional entomolog, sanitarian dan jabatan pelaksana);
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus (jabatan fungsional dokter, perawat, analis laboratorium dan jabatan pelaksana) ; dan
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas (jabatan fungsional pranata komputer, arsiparis dan jabatan fungsional lainnya) .

Setiap tim kerja mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
b. Melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
c. Melakukan koordinasi anta tim kerja;
d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
e. Menyusun laporan kegiatan; dan
f. Menyampaikan laporan kepada pimpinan.

Setiap Tim Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, maka dibentuk Wilayah Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Wilker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan unit kerja fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 4 Kabupaten yang ada diProvinsi Papua Selatan, dan memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Secara geografis, Kabupaten Merauke terletak pada 137°-141° BT dan 6°-9° LS. Luas Kabupaten Merauke ±45.071 km2, sebagian besarwilayah Kabupaten Merauke merupakan dataran rendah dan berawan. Secara geografis, berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea

(PNG) dan Australia. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki 5 wilayah kerja yang terletak di 4 (empat) kabupaten yang terdapat di Provinsi Papua Selatan. Adapun wilayah kerja tersebut terdiri dari:

Gambar 1.2
Peta Wilayah Kerja BKK Merauke

a. Wilker Pelabuhan Laut Agats/Asmat

Wilker Pelabuhan Laut Agats terletak di Kabupaten Asmat, Wilker Pelabuhan Laut Agats dapat ditempuh melalui jalur udara dengan waktu tempuh 1 jam atau jalur perjalanan laut selama ±48 jam. Jumlah sumber daya manusia 2 (dua) orang yang terdiri dari kepala wilayah kerja jabatan perawat ahli muda, dan 1 (satu) orang tenaga P3K jabatan entomolog kesehatan terampil.

Gambar 1.3
Kantor Wilker Pelabuhan Laut Agats

b. Wilker Pelabuhan laut Bade

Wilker Pelabuhan Laut Bade terletak di Kabupaten Mappi, Wilker Pelabuhan Laut Bade dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur darat selama 6 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam. Jumlah sumber daya manusia 3 (tiga) orang yang terdiri dari kepala wilayah kerja jabatan entomolog ahli pertama, 1 (satu) orang jabatan perawat terampil dan 1 (satu) orang tenaga outsourcing sebagai petugas kebersihan.

Gambar 1.4
Kantor Wilker Pelabuhan Laut Bade

c. Wilker Pelabuhan Laut Wanam

Wilker Pelabuhan Laut Wanam terletak di Kabupaten Merauke, Wilker Pelabuhan Laut Wanam dapat ditempuh melalui jalur penerbangan dengan waktu tempuh 45 menit atau melalui jalur laut dengan waktu tempuh 36 jam. Jumlah sumber daya manusia 2 (dua) orang yang terdiri dari kepala wilayah kerja jabatan perawat pengelola keperawatan dan 1 (satu) orang tenaga outcourcing sebagai petugas kebersihan. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam belum memiliki lahan dan bangunan sehingga setiap tahun dialokasikan anggaran biaya kontrak kantor.

Gambar 1.5
Kantor Pelabuhan Laut Wanam

d. Wilker Pos Lintas Batas Darat Sota (PLBD)

Wilker Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota terletak di Kabupaten Merauke, Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN) Sota dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 1,5 jam (80 km). Jumlah sumber daya manusia 4 (empat) orang yang terdiri dari kepala wilayah kerja jabatan pranata laboratorium kesehatan terampil, 1 (satu) orang jabatan sanitarian ahli dan 2 (dua) orang tenaga outsourcing sebagai petugas keamanan dan pertugas kebersihan.

Gambar 1.6
Kantor Wilker PLBDN Sota

E. Wilker Pos Lintas Batas Darat Yetetkun

Wilker Pos Lintas Batas Darat Yetetkun berada di Distrik Ninati,

Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan dapat ditempuh melalui jalur darat dengan waktu tempuh 12 jam dengan jarak tempuh sekitar 524 km. PLBN Yetetkun merupakan perbatasan antara Papua Selatan dengan Papua Nugini. PLBN Yetetkun merupakan salah

satu dari beberapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. PLBN berfungsi sebagai check point di perbatasan negara. Jumlah sumber daya manusia 3 (tiga) orang yang terdiri dari kepala wilayah kerja jabatan perawat terampil, 1 (satu) orang epidemiolog kesehatan ahli dan 1 (satu) orang jabatan sanitarian ahli pertama.

Gambar 1.7
Kantor Wilker PLBD Yetetkun

Selain melakukan pengawasan di pintu masuk PLBN Yetetkun, petugas wilayah kerja PLBN Yetetkun juga melakukan pengawasan di pintu masuk Bandara Tana Merah. Pembagian tugas dilakukan secara bergiliran.

Gambar 1.8
Gambar Pos Bandara Tanah Merah

F. Wilker Bandar Udara Mopah

Bandar Udara Kelas I Mopah merupakan bandara kelas I yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan kota-kota lain di Indonesia, Jumlah sumber daya manusia 1 (satu) orang kepala wilayah kerja jabatan dokter ahli muda, untuk membantu pelaksanaan tugas di Bandara Mopah maka setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan bertugas di Bandara Mopah.

Gambar 1.9
Pos Bandar Udara Mopah

G. Pos Pelabuhan Laut Merauke

Pelabuhan Laut Merauke terletak di Kabupaten Merauke yang dapat ditempuh melalui jalur darat selama ± 10 menit. Setiap hari petugas dari kantor induk dijadwalkan melakukan pengawasan di Pelabuhan laut Merauke.

Gambar 1.10
Gambar pos Pelabuhan Laut Merauke

E. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagaipenggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Jumlah SDM (pegawai) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke per 31 Desember 2025 sebanyak 59 orang yang terdiri dari PNS: 30 orang, P3K: 6 orang, dan outsourcing: 19 orang. Rincian jumlah pegawai PNS sebagai berikut :

a. Menurut Jabatan

1) Jabatan Struktural : 2 orang
2) Jabatan Fungsional Umum : 5 orang
3) Jabatan Fungsional tertentu : 29 orang

Grafik 1.1
Distribusi ASN Berdasarkan Jabatan

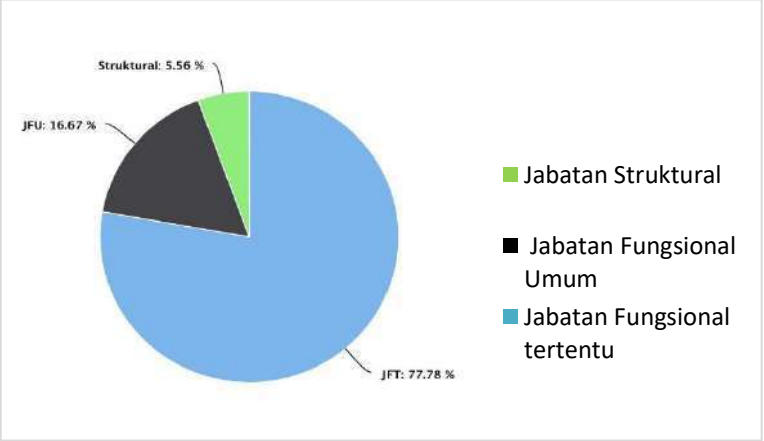

b. Tingkat dan Jenis Pendidikan

1) Profesi
   - Dokter : 3 orang
   - Apoteker : 1 orang
   - Ners : 2 orang
2) Strata 2 (S2)
   - S2 Ilmu Administrasi : 1 orang
   - S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat : 2 orang
   - Strata 1 (S1)

3) S1 Kesehatan Masyarakat : 9 orang
4) S1 Ekonomi : 3 orang
5) S1 Administrasi Negara : 1 orang
6) D – IV Kesehatan Lingkungan : 1 orang
7) Diploma 3 (D III)
   - D – III Analis Kesehatan : 1 orang
   - D – III Kesehatan Lingkungan : 5 orang
   - D – III Perawat : 7 orang
   - D – III Teknologi Laboratorium Medis : 1 orang
   - D – III Manajemen Informatika : 2 orang

c. Rincian Tenaga Outsoursing berdasarkan alokasi penerimaan sebagai berikut :

- Sopir : 2 orang
- Satpam : 4 orang
- Petugas kebersihan : 13 orang

Grafik 1.2
Rincian Tenaga Outsoursing Berdasarkan Alokasi Penerimaan

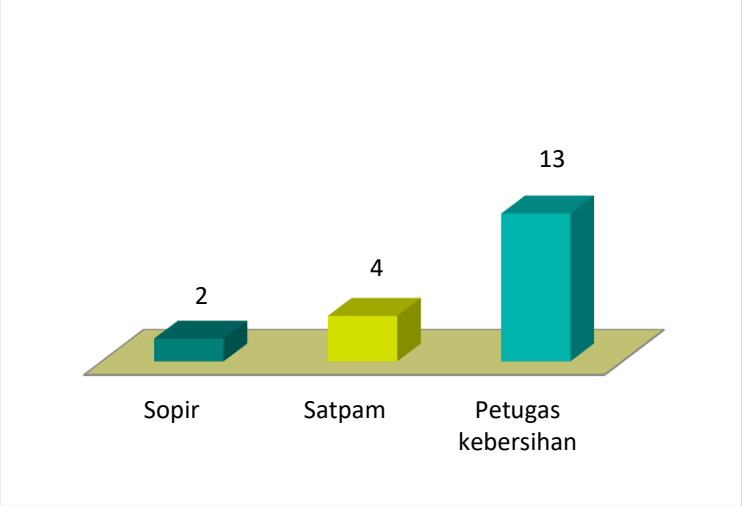

d. Distribusi ASN berdasarkan wilayah kerja

- Kantor Induk : 27 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Asmat : 3 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Wanam : 1 orang
- Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bade : 2 orang
- Wilayah Kerja PLBD Sota : 3 orang
- Wilayah Kerja PLBD Yetetkun : 3 orang
- Wilayah Kerja Bandara Mopah : 1 orang

Grafik 1.3
Distribusi ASN berdasarkan wilayah kerja

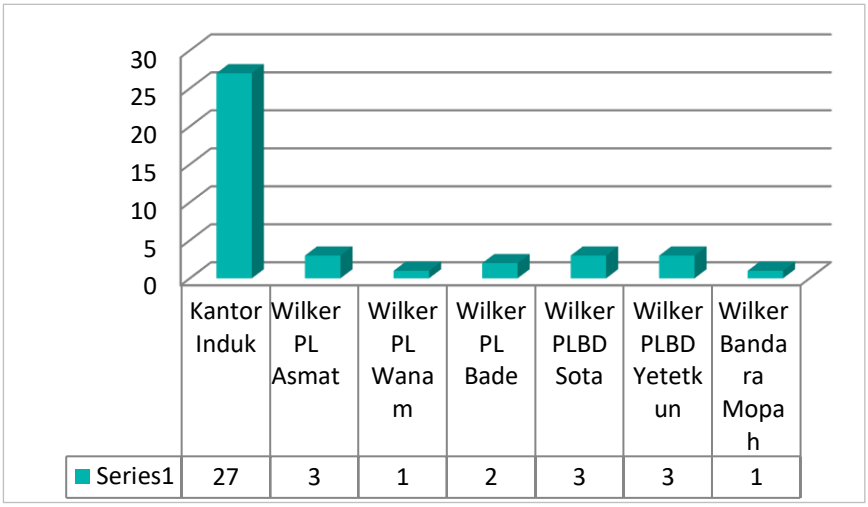

Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan Kelapa Lima juga terdapat pelabuhan rakyat diantaranya adalah : Pelabuhan Gudang arang, Pelabuhan Cikombong, Pelabuhan Sidomulyo, Pelabuhan Kumbe, Pelabuhan Kali Tamu, Pelabuhan Matandi, Pelabuhan Serapu dan Pelabuhan Lampu Satu. Setiap hari pegawai di kantor induk ditugaskan secara bergantian untuk melakukan pengawasan di pelabuhan dan Bandara Mopah Merauke.

e. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 8 orang
- Golongan III/c : 6 orang
- Golongan III/b : 4 orang
- Golongan III/a : 5 orang
- Golongan II/d : 2 orang
- Golongan II/c : 3 orang
- Golongan IX : 2 orang
- Golongan VII : 4 orang

Grafik 1.4
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan

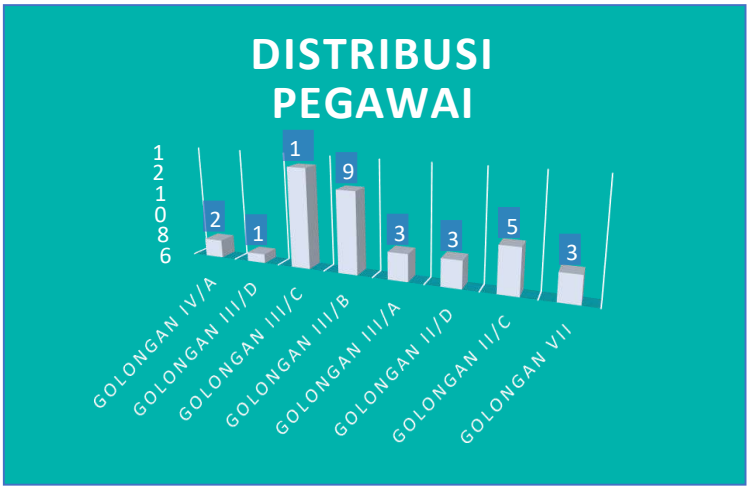

f. Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaran upaya kesehatan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi,keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggara upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negri Sipil menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir ASN dapat dicapai melalaui pendidikan formal berupa tugas belajar. Sesuai amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan perlu melaksanakan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Salah satu bentuk pengembangan SDM Kesehatan dilaksanakan

melalui program pendidikan berkelanjutan diantaranya tugas belajar. Surat Edaran ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM kesehatan yang memiliki kualifikasi, keahlian atau kompetisi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS. Upaya memberikan kesempatan kepada setiap pegawai dalam meningkatkankan Sumber Daya Manusia, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah mengirimkan pegawai untuk dapat meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar. Tahun 2024 terdapat 1 orang pegawai atas nama Rika Pratiwi yang melakukan tugas belajar di Universitas Hasanuddin peminatan Keperawatan.

F. Sistematika Penulisan

a. Kata Pengantar
b. Ringkasan Eksekutif
c. Daftar Isi
d. Bab I Pendahuluan

   Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulis laporan, maksud dan tujuan penulisan tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
e. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

   Bab ini menguraikan hal penting dalam perencanaan dan perjanjian Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada tahun 2025, meliputi :

   1) Perencanaan Kinerja

      Uraian singkat tentang Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke
   2) Perjanjian Kinerja

      Uraian singkat tentang Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2025
f. Bab III

Pada bagian ini disajikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian kinerja yang didalamnya menjelaskan analisis per indikator dengan mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi serta usulan pemecahan masalah yang akan diambil. Pada bagian ini disajikan juga beberapa sumber daya yang mendukung dalam pencapaian kinerja, Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Sarana dan Prasarana.

g. Bab IV Kesimpulan

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan pencapaian kinerja BKK Merauke serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun depan.

h. Lampiran

Lampiran berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan data dukung lainnya.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima tahun) secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tertuang di dalam Rencana Aksi Kegiatan tahun 2025-2029

1. Rencana Aksi Kegiatan 2025-2029

Renstra Kementerian Kesehatan dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) Eselon I dan oleh UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan dituangkan dalam bentukRencana Aksi Kegiatan (RAK). Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan berupaya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan dalam RAK dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian sasaran dan tujuan program. Sebagai ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Program Penanggulangan Penyakit, RAK BKK Merauke 2025-2029 telah menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja Program Penanggulangan Penyakit dengan target indikator sasaran secara bertahap setiap tahun mulai Tahun 2025 sampai Tahun 2029.

8 (delapan) indikator yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Pelabuhan/Bandara/PLBN
2. Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
3. Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN
4. Nilai kinerja anggaran
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6. Kinerja implementasi WBK Satker
7. Persentase ASN yang ditingkatakan kompetensinya
8. Persentase realisasi annggaran

Adapun perencanaan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perencanaan Kinerja BKK Merauke Tahun 2025-2029

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan diPintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara /PLBN	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
		2.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barangdan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara /PLBN	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran	87	87,2	87,4	87,6	87,8
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	95,2	95,4	95,6	95,8
		6.	Kinerja implementasiWBK satker	80	85	85	85	85
		7.	Persentase ASN yangditingkatkan kompetensinya	80%	80%	80%	85%	85%
		8.	Persentase realisasianggaran	96%	96%	96%	96,5%	96,7%

2. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko Kesehatan di wilayah kerja Pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara, maka Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke menetapkan Rencana Kinerja Tahunan dengan target yang harus dilaksanakan/dicapai

Sasaran strategi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah serta meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya paa program dengan 8 (delapan) indikator yang harus dilaksanakan dan dicapai, adapun indikator dan target tersebut dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN	NO	INDIKATOR	TAHUN 2025
1.	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN	0,99
		2.	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alatangkut, barangdan lingkungan	100%
		3.	Indeks PengendalianFaktor Risikodi Pelabuhan/Bandara/PLBN	0,92
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4.	Nilai kinerja anggaran	87
		5.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95
		6.	Kinerja implementasiWBKsatker	80
		7.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%
		8.	Persentase realisasi anggaran	96%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja atau penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 merupakan pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit pada akhir tahun 2024. Penetapan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana aksi Program Ditjen Penanggulangan Penyakit, danrencana aksi kegiatan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke yang setiap tahunnya dioperasionalkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapat persetujuan anggaran. Penetapan kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke pada akhir tahun 2024 setelah turunnya DIPA dan RKA-KL Tahun 2025. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025. Jumlah anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke Tahun 2025 sebelum revisi sebesar Rp. 10.857.593.000 dan setelah revisi Rp. 8.954.090.000.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja tahun 2025

NO	OUTPUT	PAGU (Rp)
1	**Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dan Wilayah**	
a.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	**279.903.000**
b.	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	**236.420.000**
c.	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	**30.843.000**
2	**Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada**	
d.	Nilai kinerja anggaran	**218.521.000**
e.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	**7.993.766.000**
f.	Kinerja implementasi WBK satker	**59. 547.000**
g.	Perentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	**0**
h.	Persentase realisasi anggaran	**135.090.000**
	Total	**8.954.090.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

Penetapan indikator kinerja memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif sebagai penentuan tercapainya tujuan organisasi. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke melaksanakan proses penetapan kinerja sebagai salah satu bentuk penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran target-target penetapan kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke . Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam tercapainya kinerja setiap indikator, faktor penghambat dan pendukung yang telah teridentifikasi kemudian dicarikan usulan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang.

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Persentase capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2025 dengan target kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dengan Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, terdapat dua sasaran yang harus dicapai yaitu meningkatnya kekarantinaan di pintu masuk dan wilayah dan meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit. Sasaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dan indikatornya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dan Wilayah
   1. Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
   2. Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
   3. Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN
b. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
   1. Nilai kinerja anggaran
   2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
   3. Kinerja implementasi WBK satker
   4. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
   5. Persentase realisasi anggaran

Capaian kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025

No	SASARAN	INDIKATOR		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dan Wilayah	1	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBN	0,99	1	101%
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100%	100%	100%
		3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBN	0,92	1	109%
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	87	97,50	112%
		5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	96,98	102%
		6	Kinerja implementasi WBKsatker	80	97,06	121%
		7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	97,22%	122%
		8	Persentase realisasi anggaran	96%	97,57%	102%
Rata-rata persentase capaian target						**109%**

Pengukuran kinerja setiap indikator, keberhasilan dan kegagalan dapat dapat dijelaskan sebagai berikut :

INDIKATOR 1
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang, alat angkut, barang dan lingkungan untuk menentukan ada tidaknya risiko kesehatan masyarakat atau risiko penularan penyakit.

b. Defenisi Operasional

Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan hasil pemeriksaan/penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan pada Januari - Desember Tahun 2025

c. Rumus/Cara perhitungan

Rumus

$$indeks = \frac{S}{(Smax - Smin)}$$

S = score
Smax = score maksimalSmin = score minimal

- Score dihitung dari bobotx cakupan (coverage)
- Score maksimal dihitungdari bobot x cakupan maksimal(coverage max)
- Score minimal dihitungdari bobot x cakupan minimal (coveragemin)

Terdapat 4 parameter dimensi dasar perhitungan indeks deteksi dini faktorrisiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN yakni :

1. Presentasi orang yang diperiksa sesuai standar.
2. Presentasi alat angkut yang diperiksa sesuai standar.
3. Presntasi barang yang diperiksa sesuai standar.
4. Presentasi lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Aspek yang dapat diukur di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.2
Parameter Pengukuran Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Parameter Pemeriksaan	Bandara	Pelabuhan/	PLBN	Masyarakat di wilayah pelabuhan, bandara dan PLBN
Orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan)	Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN, data kunjungan poliklinik bukan penumpang, laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja, pemeriksaan personil pesawat (termasuk ICV personil kedatangan)	Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN, data kunjungan poliklinik bukan penumpang, laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja, pemeriksaan awak kapal (termasuk ICV awak kapal)	Rekap Laporan Harian Pengawasan Pelintas Batas WNA dan WNI, Data kunjungan poliklinik bukan pelintas batas,	Skrining HIV, TB, Malaria disekitar wilayah buffer pelabuhan/ bandara / PLBN (bukan penumpang/ pelintas batas
Alat Angkut (pesawat dan kapal)	Gendec terverifikasi (ttd/stempel)	COP (kedatangan), PHQC (keberangkatan),		
Barang (Jenazah)	Ijin angkut jenazah	Ijin angkut jenazah		
Lingkungan (TTU, TPM,Air, vektor)	Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air (Lokus), Jumlah Rekapitulasi hasil survei vektor	Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air (Lokus), Jumlah Rekapitulasi hasil survei vektor	Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU, Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB), Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Air (Lokus), Jumlah Rekapitulasi hasil survei vektor	

a. Penafisan/ Pengawasan Orang

Data capaian kinerja pada sasaran indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk Negara (pelabuhan, bandara dan PLBN) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pada Tahun 2025 jumlah penafisan pada orang sebanyak 544.387 Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk Negara yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan yaitu:

1. Rekap laporan harian

   Rekap laporan harian diperoleh dari pemeriksaan penumpang pada kapal dan pesawat yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri, pemeriksan pelintas

batas WNA dan WNI di seluruh wilayah kerja Balai Karkes Kelas II Merauke. Data tersebut terdiri dari penumpang pesawat Luar Negeri dan Dalam Negeri sebanyak 403.057 orang, penumpang kapal Luar Negeri dan Dalam Negeri sebanyak 93.532 orang, pelintas batas WNA sebanyak 18.917 orang dan pelintas batas WNI sebanyak 10.702 orang. Pada tahun 2025 target pengawasan pelintas dan penumpang di Balai Kekarantinaan Kesehatan melebihi target dimana target sebanyak 366.344 dan capaian tahun 2025 sebanyak 526.208. capaian tahun 2025 melebihi target sebanyak 144 %. Peningkatan capaian target pada tahun 2025 disebabkan adanya peningkatan pengawasan pelaku perjalanan Luar Negeri pada pelabuhan dan Bandara serta adanyan penambahan pengawasan pelintas batas dimana pada tahun 2025 sudah aktif beroperasi PLBN Yetetkun.

2. Pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik bukan penumpang

   Pemeriksaan kesehatan pada kunjungan poliklinik rutin pemeriksaan tersebut seperti : pemeriksaan kru kapal yang akan joint, pemeriksaan guna vaksinasi internasional (Vaksinasi Yellow Fever, Vaksinasi Influenza, Vaksinasi Polio dan Vaksinasi Meningitis), Pemeriksaan guna penerbitan surat keterangan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan pada masyarakat pelabuhan/bandara/PLBN dalam rangka rawat jalan maupun kegawatdaruratan. Jumlah capaian kunjungan poliklinik bukan penumpang pada Tahun 2025 sebanyak 2.523 orang dengan target tahun 2025 sebanyak 1.500. capaian pada tahun 2025 melebihi target sebanyak 168 %.

3. Pemeriksaan Penjamah Makanan di wilayah Bandara dan PLBN

   Pemeriksaan pada penjamah makanan diwilayah Bandara dan PLBN pada Tahun 2025 sebanyak 65 layanan dan target tahun 2025 sebanyak 51 layanan . capaian melebihi target atau dalam persentase sebanayak 127%.

4. Pemeriksaan awak kapal (termasuk ICV awak kapal)

   Pemeriksaan yang dilakukan guna penerbitan sertifikat P3K Kapal dan PHQC. Pada kegiatan tersebut jumlah awak kapal yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 8.199 awak kapal dengan target 5.400 artinya pada pemeriksaan awal kapal capaian melebihi target sebanyak 152%.

5. Skrining TB,Malaria dan HIV diwilayah buffer bandara/pelabuhan bukan penumpang.

   Kegiatan skrining dilakukan pada masyarakat yang berada diwilayah kerja Balai Karkes Kelas II Merauke. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan deteksi dini terhadap penyakit TB,Malaria dan HIV sehingga dapat menekan angka penularan dan kematian karena kasus penyakit tersebut. total target capaian sebanyak

7.392 dengan target tahun 2025 sebanyak 4.670 dengan rincian data hasil skrining pada Tahun 2025 terdiri dari: skrining malaria sebanyak 3.043, skrining HIV sebanyak 723 dan skring TB sebanyak 3.626. capaian tahun 2025 melebihi target 158%.

b. penafisan/ pengawasan Alat Angkut

Dilakukan secara rutin setiap hari disemua wilayah kerja Balai Karkes Kelas II Merauke. Pemeriksaan kedatangan alat angkut (kapal dan pesawat) dari luar dan dalam negeri, dari luar negeri dapat tercermin melalui jumlah penerbitan dokumen COP dan PHQC untuk kapal dan Gendec untuk pesawat sedangkan dari dalam negeri tercermin dalam penerbitan PHQC.pada wilayah PLBN penerbitan GCDH. Jumlah penerbitan PHQC sebanyak 3.912 dokumen, sedangkan untuk dokumen COP sebanyak 7,Gendec dan GCDH sebanyak 6 dokumen.

c. Penafisan /Pengawasan Lingkungan

Pelaksanaan deteksi faktor risiko dipelabuhan/bandara/PLBN pada indikator lingkungan terdiri dari empat kegiatan yaitu :

1. Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU

   Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan TTU dilakukan diwilayah perimeter BKK Kelas II Merauke, kegiatan ini meliputi pemeriksaan kualitas air secara fisik, kualitas udara, kebersihan serta kepadatan vector penyakit DBD, malaria, diare serta PES untuk memastikan TTU di wilayah kerja BKK Merauke memenuhi syarat Kesehatan sesuai standar baku mutu Kesehatan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, bandara Mopah Merauke dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke dengan hasil 87 lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, target Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan tahun 2025 adalah 348 lokus dan capaian Tahun 2025 adalah 352 sehingga Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan adalah 101%.

2. Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP)

   Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan inspeksi tempat pengolahan makanan di Pos bandara Mopah Merauke, target Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan Tahun 2025 adalah 116 lokus dan capaian Tahun 2025 115 sehingga Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan adalah 99%.

3. Jumlah Form Inspeksi Kesehatan Lingkungan Pengawasan sarana air bersih (ISPAB)

Kegiatan Inspeksi kesehatan lingkungan pengawasan sarana air bersih meliputi pemeriksaan kualitas air bersih pada alat angkut yaitu pemeriksaan secara fisik terkait warna, bau dan rasa, kegiatan ini dilakukan bersamaan pada saat melakukan pemeriksaan sanitasi pada alat angkut dan juga pada saat clearance in/clearance out kapal, pada tahun 2025 target 900 SAB dengan capaian 1030 SAB dengan capaian 114%, capaian lebih tinggi dari target disebabkan pada tahun 2025 banyak alat angkut (kapal) yang bukan base home di wilayah Merauke melakukan pemeriksaan sanitasi alat angkut di BKK Merauke.

d. Penafisan /Pengawasan Barang

Pemeriksaan barang yang diperiksa sesuai standar khususnya untuk jenazah, tercermin melalui jumlah dokumen surat ijin angkut jenazah (SIAJ) yang diterbitkan oleh Balai Karkes Kelas II Merauke dan dokumen jenazah tiba yang diterima BKK Kelas II Merauke sebanyak 205 dokumen. Sebelum penerbitan SIAJ dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti surat keterangan kematian bukan karena penyakit menular, surat pengawetan dan surat keterangan bebas Covid-19 dari Rumah Sakit, surat keterangan kremasi untuk abu jenazah. Memastikan pengepakan atau pemetian jenazah sesuai dengan aturan yang berlaku.

d. Capaian indikator

Sesuai dengan defenisi operasional, terdapat empat komponen yang menjadi ukuran dari terpenuhinya pemeriksaan orang,alat angkut,barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan, dimana empat komponen tersebut adalah:

1) Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja indikator indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN tahun 2025

Adapun perbandingan target dan realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Target Dengan Realisasi Indikator Indeks Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2025

Indikator kinerja	Target		Realiasi Tahun 2025		Persentase
Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,99	Indeks	1	Indeks	101 %

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa target indikator indeksdeteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebesar 0,99 dapat terealisasi sebesar 1 (101 %). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi untuk indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN telah mencapai/melampaui target yang telah ditentukan.

2) **Perbandingan realisasi kinerja indikator deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Parameter untuk mengetahui indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN adalah jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Adapun perbandingan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

NO	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
1	Jumlah Pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan Lingkungan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan	256.223	383.744	150	264.663	458.556	173	313.961	515.722	164	382.098	550.405	144
	Indeks Faktor Risiko di Pintu Masuk	0,93	0,98	105	0,99	0,99	101	0,99	1	101	0,99	1	101

Grafik 3.1
Jumlah Pemeriksaan Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun 2022,Tahun 2023 dan Tahun 2024

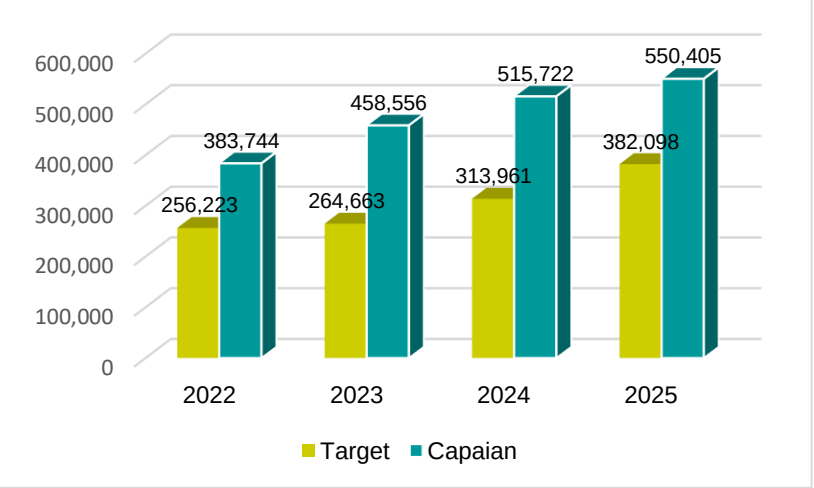

Berdasarkan tabel dan grafik 3.1 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan pada periode tahun 2025 sebesar 550.405, hasil capaian pada tahun 2025 lebih tinggi dari target dimana target pada tahun 2025 sebanyak 382.098. Berikutnya capaian tahun 2025 (505.405) lebih tinggi dari capaian tahun 2022

(383.774), tahun 2023 (458.556), dan tahun 2024 (515.722). Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan yang dilakukan dalam pengawasan dan pemeriksaan pada orang,barang,alat angkut dan lingkungan. Dalam hal ini pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah frekuensi penerbangan kapal dan pesawat yang tiba dan berangkat dari Luar Negeri sehingga pada pengawasan orang dan alat angkut terjadi peningkatan capaian yang tinggi.

Apabila persentase capaian indeks deteksi faktor risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan desember tahun 2025, maka akan didapatkan grafik sebagai berikut:

Grafik 3.2
Grafik Target dan Realisasi Pemeriksaan Orang, Alat Angkut Barang dan Lingkungan Tahun 2025 Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

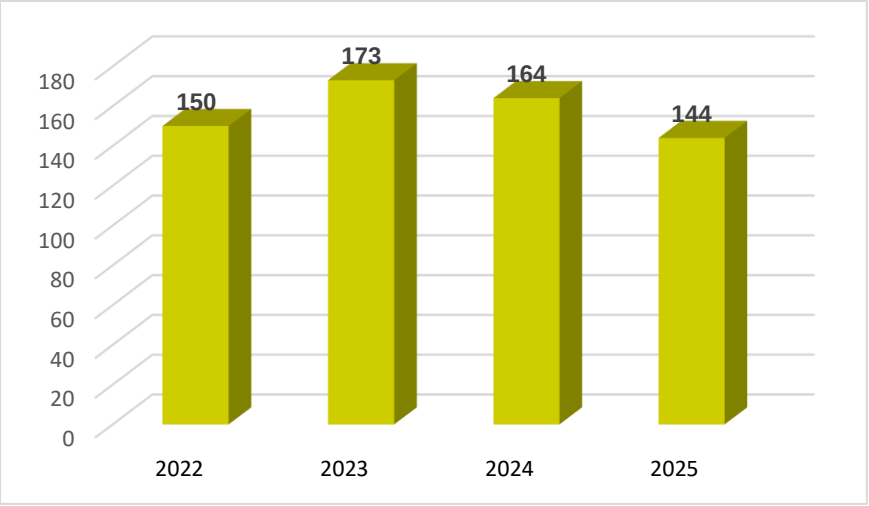

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pencapaian target indikator jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan pada tahun 2021 sebesar 122%, tahun 2022 sebesar 150%, tahun 2023 sebesar 173%,Tahun 2024 sebesar 164% dan tahun 2025 sebesar 144%. Capaian persentasi jumlah deteksi faktor risiko mengalami trend peningkatan dari tahun 2021 s/d 2023 dan mengalami penurunan mulai tahun 2023 s/d 2025.

Capaian indikator berupa indeks yang dapat di bandingkan adalah indeks capaian tahun 2022,2023, 2024 dan tahun 2025 Apabila dibandingkan, maka akan diperoleh grafik sebagai berikut:

Grafik 3.3
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2022,2023,2024 dan Tahun 2025

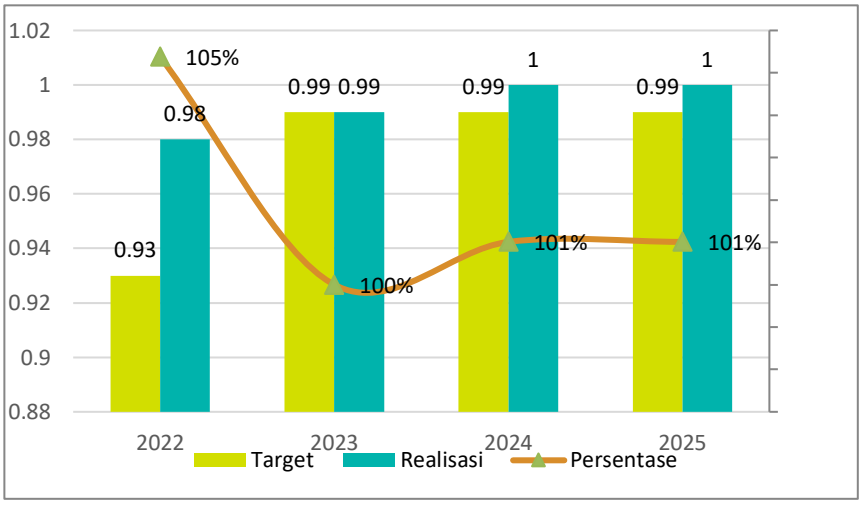

Dari Grafik 3.3 Persentase capaian indikator pada indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada tahun 2025 (101%) sama dengan tahun 2024 (101%), lebih tinggi dari tahun 2023 (100%) dan lebih rendah dari tahun 2022 (105%), hal ini disebabkan karena target tahun 2025 (0,99) lebih tinggi dari target tahun 2022 (0,93).

3) Perbandingan realisasi kinerja Indikator deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan target Jangka Menengah(RAK 2025-2029)

Realisasi kinerja indikator indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN jika dibandingkan dengan RAK 2025-2029 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
Target	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Capaian	1	-	-	-	-
Persentase	101%	-	-	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian target tahun 2025 adalah 1 dari target 0,99.(101%) dan target yang ditetapkan untuk tahun 2026 s/d 2029 adalah 0,99.

4) Perbandingan realisasi kinerja indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan standar nasional

Capaian Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN merupakan

indikator yang mendukung pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, namun tidak dapat dibandingkandengan standar nasional, karena indikator Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN tidak terdapat dalam RAK 2025-2029 Kementerian Kesehatan dan RAP 2025-2029 Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

5) **Perbandingan realisasi kinerja indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BKK Merauke dengan satker lainnya yang setara.**

Perbandingan realisasi kinerja indeks deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan BKK Kelas II Biak , BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit dapat dilihat pada grafik:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2025 dengan Satker Sejenis

NO	INDIKATOR	BKK Merauke			BKK Biak			BKK Manokwari			BKK Sampit			BKK Palu			BKK Poso		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0,99	1	101%	0,96	1	104%	0,85	0,91	107%	0,91	0,95	104%	0,89	0,96	108%	0,95	0,97	102%

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa persentase realisasi indikator indeks deteksi faktor risiko di pintu masuk negara tahun 2025 BKK Merauke 101%, lebih rendah dari realisasi BKK Kelas II Biak 104 %, BKK Kelas II Manokwari 107%, BKK Kelas II Sampit 104%, BKK Palu 108%, dan BKK Poso 102%. Persentase Realisasi BKK Merauke lebih rendah dibandingkan dengan BKK lainnya karena target indikator indeks deteksi faktor risiko di pintu masuknegara BKK Merauke (0,99) paling tinggi dibanding satker lainnya.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media komunikasi *online* seperti *Whatsapp* Grup atau koordinasi dengan melakukan rapat koordinasi.
2) Melakukan Survey Kepuasan terhadap pengguna jasa sehingga dapat memperoleh masukan atau saran dari pengguna jasa guna meningkatkan mutu layanan dalam melakukan deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.
3) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap hari kerja melalui *briefing* pagi untuk membahas permasalahan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan orang, barang, alat angkut dan lingkungan di pintu masuk.
4) Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilaksanakan setiap hari kerja.

5) Melaksanakan rapat evaluasi indikator Kinerja dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi indikator kinerja kegiatan setiap bulan.
6) Membuat inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa sehingga meningkatkan kepuasan pengguna jasa terhadap kinerja BKK Merauke . Hal ini turut mendukung peningkatan kuantitaspelayanan yang lebih baik terhadap pengguna jasa.
7) Melakukan sosialisasi program, regulasi, dan kegiatan yang dilaksanakan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke melalui media sosial resmi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke seperti Instagram, Facebook, ataupun media edukasi dalam bentuk Leaflet dan banner sehingga masyarakat/ pengguna jasa dapat lebih mengenal tugas pokok dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

f. Analisa Penyebab keberhasilan

Persentase capaian indikator deteksi faktor risiko di pelabuhan /Bandara /PLBDN tahun 2025 telah mencapai/melampaui target karena terbentuknya sistem Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah efektif dan efisien untuk diterapkan di lapangan dengan memanfaatkan seluruh pejabat fungsional yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke serta adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam melakukan cegah tangkal penyakit di pintu masuk.

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1) Faktor cuaca/ kondisi alam yang mengakibatkan penundaan/ pembatalan keberangkatan kapal.
2) Adanya perbedaan data manifest dari agen pelayaran dengan hasil pengawasan yang dilakukan karena beberapa penumpang naik/turun tidak membeli tiket (tidak mampu secara ekonomi).
3) Masih kurangnya pemahaman pada pelaku perjalanan terkait kondisi kesehatan (penyakit tertentu) pada penumpang maupun crew kapal/pesawat yang laik/tidak laik untuk melakukan perjalanan dengan alat angkut pesawat maupun kapal.
4) Masih ada masyarakat/pengguna jasa yang bingung atau tidak bisa melakukan pendaftaran vaksinasi secara online.

h. Pemecahan Masalah

1) Menyiapkan team petugas piket clearance in/out yang standby untuk antisipasi jadwal kapal yang berubah sewaktu-waktu.
2) Berkoordinasi dengan pihak Otoritas Pelabuhan , Otoritas Bandara, Agen Kapal dan pihak terkait manifest penumpang yang berangkat dan tiba baik melalui alat angkut pesawat maupun kapal, sehingga dapat di update sesuai jumlah penumpang yang

tiba dan berangkat.

3) Melakukan sosialisasi melalui media cetak maupun media sosial dan menyampaikan kepada pihak maskapai dan keagenan kapal terkait kondisi kesehatan yang laik/tidak laik untuk melakukan perjalanan dengan alat angku pesawat dan kapal.
4) Sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak (standing banner) maupun media sosial tentang langkah-langkah pendaftaran vaksinasi meningitis secara online dan menyediakan petugas untuk membantu pendaftaran kepada pengguna jasa.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.7
Tabel Perhitungan Nilai Efisiensi Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	279.903.000	279.804.300	99,96%	101%	52,56%

Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandarta/PLBDN telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 52,56%, hal ini berarti dengan realisasi anggaran sebesar 99,96%, capaian kinerja dapat tercapai 101%.

INDIKATOR 2
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a. Pengertian

Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan merupakan penemuan adanya faktor risiko penyakit yang dilakukan dari hasil pemeriksaan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dan dikendalikan untuk mencegah potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dunia (KKMD).

b. **Defenisi Operasional**

Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun.

j. Rumus/ Cara perhitungan

Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaanorang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%.

Tabel 3.8
Parameter Faktor Risiko yang Dikendalikan di BKK Merauke
Tahun 2025

PEMERIKSAAN	FAKTOR RISIKO DITEMUKAN	FAKTOR RISIKO DIKENDALIKAN
Orang	• Penumpang dengan suhu >37,5° • Penumpang yang di karantina • Penumpang Covid-19 Positif • Penumpang sakit	• Rujukan • Isolasi • Tolak berangkat • Vaksinasi Meningitis dan Yellow Fever (tidak

	• Penumpang dengan saturasi oksigen <95% • Ibu hamil usia>32 minggu • Kadar Hb <8.5 gr/dL • Khusus haji : Ibu hamil usia kehamilan <14 minggu dan >26 minggu, • penumpang dengan penyakit menular yang menimbulkan wabah, • Penumpang yang belum vaksin Meningitis, • Penumpang denganICV palsu/ Expire • Jumlah penumpang HIV Positif • Jumlah penumpang TB Positif • Jumlah penumpang Malaria Positif	termasuk Covid) • pertolongan gawat darurat • ijin angkut orang sakit • surat layak terbang bagi yang beresiko • rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina)
Alat Angkut	• Ditemukannya vektor kecoa, tikus, lalat, nyamuk pada alat angkut • Ditemukannya penumpang Positif/ sakit • Alat angkut yang tidak memiliki P3K • Alat angkut dengan air tercemar/ terkontaminasi	• SSCC (desinfeksi, desinseksi, deratisasi, desinfeksi, dekontaminasi) • Tindakan Karantina (Surat bebas karantina kapal) • Laporan desinseksi/ desinseksi pesawat • One month extention
Barang	• Jenazah penyakit menular dan potensial wabah (meningitis, covid, TB)	• Jenazah tidak diberangkatkan/ tolak berangkat atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap.
Lingkungan	• Pemeriksaan TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia, lingkungan) • Pemeriksaan TPM (fisik, E-Coli, MPN Coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak) • Pemeriksaan Air yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi (E-Coli, MPN Colifirm, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) • Pengendalian DBD	• TTU (Rekomendasi kepada pengelola TTU) • TPM (Rekomendasi kepada pengelola TPM berrdasar hasil usap alat makan dan usap tangan penjamah makanan yang tidak higienis, agar penjamah makanan selalu memperhatikan kebersihan alat makan dan kebersihan tangan dalam menyajikan makanan) • Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, • House index perimeter >0 dilakukan tindakan pengendalian vector DBD yaitu fase larva dengan larvasida dan nyamuk dewasa Aedes,sp melalui tindakan pengasapan (fogging dan pengkabutan (ULV)

k. Capaian Indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

1) Perbandingan target dengan realisasi kinerja indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Tabel 3.9
Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan

NO	FAKTOR RISIKO	JUMLAH FAKTOR RISIKOYANG DITEMUKAN	JUMLAH FAKTOR RISIKOYANG DIKENDALIKAN	PERSENTASE	TARGET PK	PERSENTASE CAPAIAN TARGET
1	Pemeriksaan Orang	1794	1794	100%	100%	100%
2	Pemeriksaan alat angkut	0	0	0%		
3	Pemeriksaan barang	0	0	0%		
4	Pemeriksaan lingkungan	21	21	100%		
	Jumlah	**1815**	**1815**	**100%**		

Berdasarkan data dari tabel faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa BKK Merauke telah melakukan pengendalian atas seluruh faktor risiko yang ditemukan, dan turut berperan di dalam pengendalian faktor risiko yang ditemukan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN.

2) Perbandingan persentase realisasi kinerja indikator pengendalian faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Grafik 3.4
Perbandingan Persentase Faktor Risiko yang Ditemukan dan Dikendalikan Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

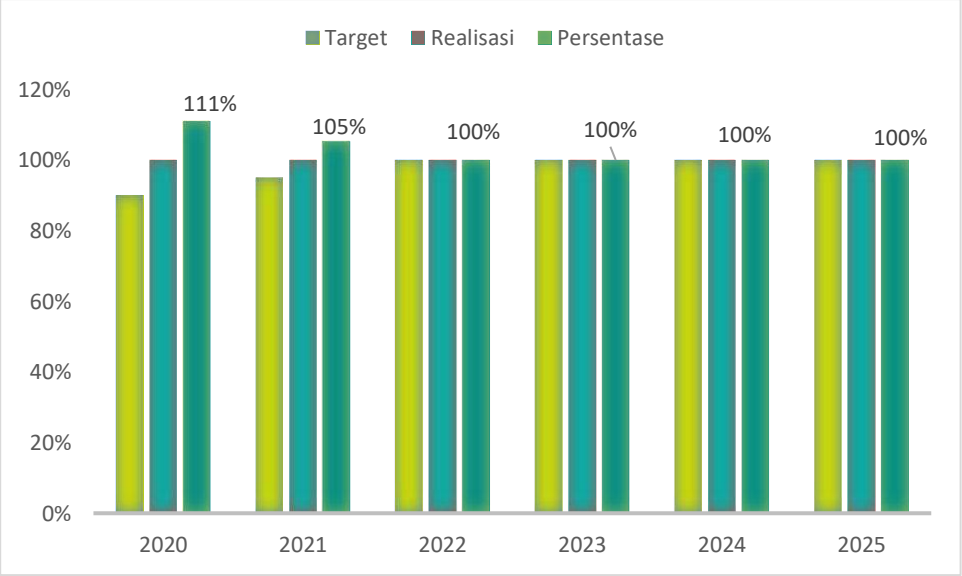

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada tahun 2025 sebesar 100%, pada Tahun 2024 sebesar 100 %, tahun 2023 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 105% dan tahun 2020 sebesar 111%. Setiap tahun faktor risiko yang ditemukan dapat dikendalikan 100%, hal ini menunjukkan komitmen BKK Merauke dalam melakukan

pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN. Sementara proyeksi capaian pada tahun 2026 adalah 100%.

3) Perbandingan realisasi kinerja persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2025 dengan target Jangka Menengah(RAK 2025-2029)

Grafik 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator
Persentase Faktor Riko yang Ditemukan dan Dikendalikan
Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah(RAK 2025-2029)

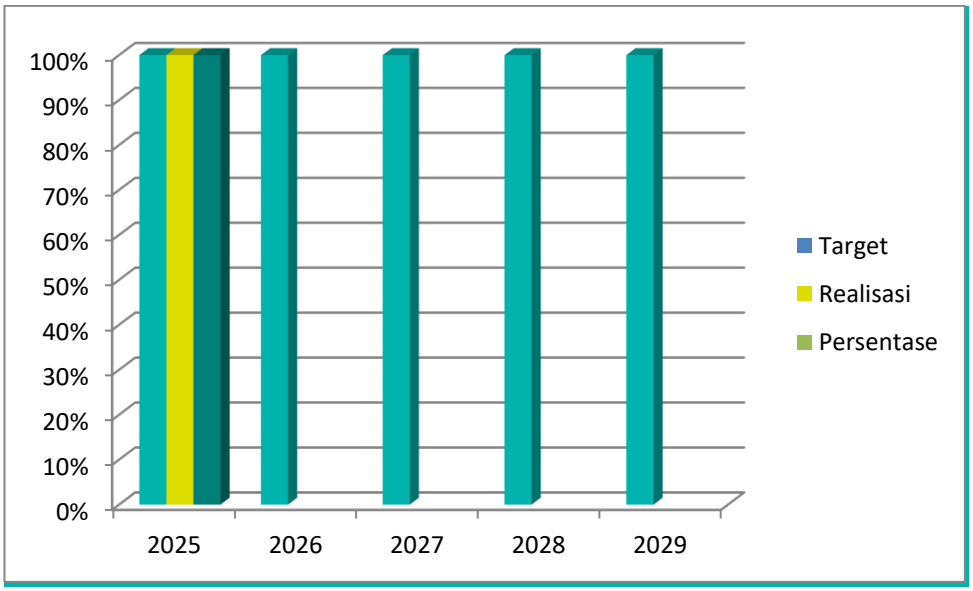

Target persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingan dengan RAK 2025-2029, dapat disimpulkan bahwa realisasi tahun 2025 sesuai dengan target RAK 2025-2029 sebesar 100%

4) Perbandingan realisasi kinerja persentase faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan tahun 2025 dengan standar nasional

Penetapan target kinerja satuan kerja tidak lepas dari upaya untuk mendukung pencapaian kinerja tingkat Eselon

1 yang pada akhirnya level Kementerian/Lembaga. Perbandingan realiasasi kinerja BKK Merauke tahun 2025 dengan target nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Kinerja Persentase Faktor Risiko yang ditemukan dan Dikendalikan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator RAP / Renstra Kemenkes	Target	Indikator BKK Merauke	Realisasi
Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	100%	Persentase faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	100%

Berdasarkan data pada tabel indikator persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan, capaian kinerja BKK Merauke sama dengan dari Target Nasional yaitu 100%.

5) Perbandingan realisasi kinerja satker dibandingkan dengan satker lainnya

Tabel 3.11
Perbandingan realisasi kinerja indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan dibandingkan dengan BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari, dan BKK Kelas II Sampit

INDIKATOR	BKK MERAUKE			BKK KELAS II BIAK			BKK KELAS II MANOKWARI			BKK KELAS II SAMPIT		
	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	PERSENTASE (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	PERSENTASE (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	PERSENTASE (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)	PERSENTASE (%)
Faktor Risikoyang Ditemukan dan Dikendalikan	100	100	100	100	100	100	92	100	108.69	98	100	102.04

Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase capaian target indikator faktor risiko yang ditemukan dan dikendalikan pada periode Tahun 2025 oleh BKK Merauke sebesar 100% (dari target 100%), Kelas II Biak sebesar 100% (dari target 100%) BKK Kelas II Manokwari sebesar 108,72% (dari target 92%), dan BKK Kelas II Sampit 102,04% (dari target 98%). Persentase Capaian BKK Kelas II Biak sama dengan BKK Merauke yaitu 100 %, sedangkan persentase capaian jika dibandingkan dengan BKK Kelas II Manokwari dan BKK

Kelas II Sampit, lebih rendah disebabkan target BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit lebih rendah dibanding target BKK Merauke .

I. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Melakukan skrining penyakit secara rutin dan berkelanjutan di pintu masuk

2) Menerapkan penggunaan aplikasi *All Indonesia*, yaitu sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu milik Pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan layanan Keimigrasian, Bea Cukai, Kesehatan, dan Karantina dalam satu platform digital (web dan mobile). Dengan aplikasi ini proses masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia akan lebih cepat, mudah dan lebih efisien karena cukup dengan satu kali pengisian data sebelum tiba di Indonesia.

   Penerapan pengawasan kesehatan penumpang melalui aplikasi *All Indonesia*, memungkinkan dilakukannya skrining proaktif data kesehatan penumpang sebelum tiba, pemberian notifikasi dini potensi wabah, serta percepatan pelayanan kesehatan di pintu masuk negara. Hal ini mendukung transformasi digital kesehatan di Indonesia. Selain itu, pengawasan faktor risiko penyakit pada orang di pintu masuk akan lebih cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga mencegah secara dini penyebaran penyakit menular.

3) Menerapkan penggunaan Aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) untuk mendeteksi dini ancaman Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular melalui sistem notifikasi (*alert*) ketika jumlah kasus melebihi ambang batas yang ditetapkan. Penerapan aplikasi ini memungkinkan dilakukannya respons cepat, pemantauan tren penyakit, pengelolaan risiko kesehatan di area karantina (pelabuhan/ bandara/ PLBN), serta penguatan sistem surveilans guna meminimalkan dampak terhadap kesehatan masyarakat.

4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan lintas

sektor dan lintas program untuk membangun jejaring yang solid dalam mengenalkan tugas pokok fungsi BKK Merauke kepada masyarakat/ pengguna jasa, menyelesaikan kendala yang mungkin terjadi di lapangan dengan cepat dan tepat, sehingga mendukung lancarnya pengawasan kesehatan orang, barang, alat angkut, maupun lingkungan di pintu masuk.

5) Memfasilitasi sarana dan prasarana (alat kesehatan dan bahan habis pakai) kesehatan untuk mendukung pemeriksaan pelaku perjalanan
6) Presentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada lingkungan:
   - Larvasida dan Pemberantasan Sarang Nyamuk
   - Pengendalian vektor DBD melalui fogging dan pengkabutan
   - Pengendalian vektor malaria melalui tindakan IRS
   - Pengendalian vektor diare
   - Edukasi kepada pemilik Tempat Pengolahan Pangan
   - Edukasi kepada pengelola Tempat - Tempat Umum
   - Desinfeksi alat angkut
   - Desinseksi alat angkut

m. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Persentase capaian indikator persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan tahun 2025 memenuhi target dengan capaian persentase 100%. Keberhasilan pengendalian faktor risiko di pintu masuk dicapai dengan :

1) Dukungan dan kerjasama dari pihak pemerintah daerah, lintas program, lintas sektor dan para mitra kerja.
2) Adanya payung hukum dan pedoman yang jelas tentang kegiatan kekarantinaan kesehatan di Pelabuhan/ Bandara/ PLBDN .
3) Adanya media komunikasi *online* untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna jasa.
4) Adanya koordinasi melalui Grup Whatsapp terkonsentrasi yang dibuat untuk mempermudah pengawasan orang,

barang, alat angkut dan lingkungan di wilayah kerja, contoh *Whatsapp Grup* Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, *Sentinel ILI (Influenza Like Illness)*, dan lain-lain. Dengan adanya komunikasi terkonsentrasi melalui grup tersebut, mempermudah dalam sharing informasi lintas sektor/lintas program sehingga lebih mudah melakukan deteksi dini faktor risiko yang ditemukan dan lebih cepat dalam melaksanakan pengendalian.

5) Promosi kegiatan dan layanan yang dilakukan sesuai tugas pokok fungsi BKK Merauke melalui media sosial (Instagram, Facebook, Website BKK Merauke) diseluruh wilayah kerja, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kepada BKK Merauke sehingga permintaan layanan juga meningkat.
6) Kesiapan pegawai dalam melakukan pengawasan alat angkut, orang dan barang terutama jika terjadi perubahan jadwal kedatangan kapal (pengaruh cuaca)
7) Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana, SDM yang berkompeten walaupun dari segi kuantitas belum memadai.
8) Meningkatnya output kegiatan di wilayah kerja disebabkan intensnya komunikasi, evaluasi, dan monitoring yang dilakukan dalam setiap koordinasiyang dilakukan.

n. Kendala/masalah yang dihadapi

1) Beberapa jenazah dan pemetiannya yang diangkut dari kabupaten lain yang bukan merupakan wilayah kerja BKK Merauke dan transit di Merauke tidak memenuhi standar karantina sehingga harus dilaksanakan pemeriksaan jenazah dan pemetian kembali di Kabupaten Merauke
2) Beberapa kegiatan rujukan dari daerah perifer menuju Merauke tidak terkoordinir dengan baik karena sulitnya sinyal komunikasi kepada petugas BKK, sehingga terdapat beberapa pasien dengan diagnosa suspek penyakit menular seperti TB paru yang belum mendapat pengobatan yang dirujuk.
3) Ketersediaan jumlah alat angkut (pesawat) yang masih terbatas terutama yang bersubsidi, menjadi salah satu

faktor risiko kurang amannya kegiatan rujukan bagi pasien dari daerah perifer. Ketersediaan jumlah kursi dalam pesawat bersubsidi seringkali membatasi petugas medis mendampingi pasien rujukan selama dalam perjalanan. Keterbatasan sarana prasarana alat kesehatan dan bahan habis pakai seperti oksigen di atas pesawat perintis seringkali terjadi dan menimbulkan risiko kesehatan bagi pasien dengan penyakit saluran pernapasan kronis ataupun dengan kondisi saturasi oksigen yang kurang dari normal.

4) Pada kegiatan pengendalian DBD dengan fogging, mengalami kendala pelaksanaan karena dipengaruhi oleh faktor cuaca.

o. Pemecahan Masalah

a) Menyampaikan permasalahan secara lisan kepada pihak pengelola bandara dalam rapat evaluasi bandara sehat.

b) Melakukan sosialisasi kepada pihak maskapai, dinas kesehatan, rumah sakit dan fasyankes tentang tatacara pemetian jenazah yang akan diangkut

c) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak Maskapai mengenailayanan rujukan di pintu masuk dan melakukan tindakan pengawasan desinfeksi terhadap alat angkut (pesawat/ kapal) dan mobil ambulance yang dipakai untuk mengangkut pasien dengan suspek penyakit menular.

d) Meningkatkan koordinasi dengan stake holder dan pengguna jasa dalam kasus rujukan, dalam hal ini instansi pengirim rujukan dan instansi penerimarujukan melalui grup Whatsapp, sehingga dapat meminimalisir kendala rujukan yang ada.

e) Pada kegiatan pengendalian DBD dengan fogging yang bergantung pada cuaca, diminimalisir dengan larvasida, hingga cuaca membaik untuk dilaksanakan.

f) Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit menular antar wilayah dan negara dengan selalu memperhatikan perkembangan informasi

kesehatan melalui halaman resmi Kementerian Kesehatan https://infeksiemerging.kemkes.go.id

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.12
Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	236.420.000	236.140.000	99,88%	100%	50,30%

Indikator Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 50,30%, dimana berarti nilai dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,88% dapat mencapai realisasi kinerja sebesar 100%.

INDIKATOR 3
Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

a. Pengertian

Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN adalah nilai yang menunjukkan besaran risiko penyakit di Pelabuhan/Bandara/PLBDN

b. Defenisi Operasional

Status faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun.

c. Rumus/Cara perhitungan

Rumus:

$$indeks = \frac{S}{(Smax - Smin)}$$

- Score dihitung dari bobotx cakupan (coverage)
- Score maksimal dihitungdari bobot x cakupan maksimal(coverage max)
- Score minimal dihitungdari bobot x cakupan minimal (coveragemin)

Parameter perhitungan terdiri dari:

a) Persentase sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80 %
b) Persentase bandara/ pelabuhan dengan indeks pinjal ?1
c) Persentase bandara/ pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)
d) Persentase bandara/ pelabuhan dengan indeks populasi kecoa <2
e) Persentase bandara/ pelabuhan dengan indeks populasi lalat < 2
f) Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI Perimeter = 0
g) Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI Buffer <1
h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan
i) Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan
j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologis/ bakteriologis

Kesepuluh persentase parameter dimasukkan dalam rumus indeks.

d. Capaian target indikator

1) Perbandingan Target Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Realisasi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Realisasi memiliki sepuluh parameter yang dapat dilihat realisasi atas target yang telah ditentukan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Rekap Realisasi Kinerja Pada Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Pada Tahun 2025

INDIKATOR	PARAMETER	TARGET TAHUNAN	CAPAIAN TAHUN 2025	PERSENTASE
Indeks Pengendalian Faktor risiko di Pelabuhan/Bandara /PLBN	Jumlah Capaian Indikator	**826**	**909**	**110%**
	Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	15	**19**	**127%**
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	54	**66**	**122%**
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Tidak ditemukan larva	72	**86**	**119%**
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Indeks Populasi Kecoa<2	60	**82**	**137%**
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan Indeks Populasi Lalat<2	72	**83**	**115%**
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI perimeter = 0	72	**86**	**119%**
	Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI buffer <1	10	**13**	**130%**
	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	348	352	**101%**
	Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	116	115	**99%**

	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/ bakteriologis	7	7	**100%**

10 parameter dimensi dasar perhitungan Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk yaitu :

a. **Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%**

Persentase Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon Kurang dari 24 Jam dengan Kelengkapan ≥80%. Indikator Persentase Sinyal Surveilans Kewaspadaan Dini (SKD) Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan minimal 80% merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam mendukung pelaksanaan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi KLB dan bencana di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, pada Tahun 2025 target sinyal SKD KLB dan Bencana yang harus direspon ditetapkan sebanyak 15 sinyal. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan surveilans dan respons cepat, capaian realisasi pada Tahun 2025 sebanyak 19 sinyal, sehingga diperoleh persentase capaian sebesar 127%. Tingginya capaian indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1) Optimalisasi pelaksanaan Surveilans Kewaspadaan Dini (SKD) secara rutin dan berkelanjutan melalui pemantauan laporan penyakit berpotensi KLB, kejadian kesehatan masyarakat, serta kondisi lingkungan dan faktor risiko di wilayah kerja.
2) Penguatan pelaksanaan Event Based Surveillance (EBS), yaitu pengumpulan dan analisis informasi kejadian kesehatan yang bersumber dari berbagai kanal, seperti laporan masyarakat, media massa, informasi lintas sektor, laporan petugas lapangan, serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk laporan dilapangan di dapat dari informasi adanya kasus kematian ABK Kapal yang di lakukan veripikasi dan investigasi sebanyak
3) Respon cepat dan tepat waktu terhadap setiap sinyal SKD KLB dan bencana yang terdeteksi, dengan memastikan pelaksanaan verifikasi awal, analisis risiko, dan tindak lanjut respon dilakukan dalam waktu kurang dari 24 jam sesuai standar operasional prosedur.
4) Kelengkapan respon minimal 80% dapat dipenuhi melalui pendokumentasian kegiatan secara tertib dan sistematis, meliputi

pengumpulan data epidemiologi, pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor, penyusunan laporan respon, serta rekomendasi tindak lanjut yang jelas.

5) Peningkatan kapasitas SDM surveilans melalui pembinaan internal, koordinasi tim surveilans dan penindakan kekarantinaan, serta kesiapsiagaan petugas di wilayah kerja dan pintu masuk.
6) Koordinasi lintas sektor dan lintas program yang berjalan dengan baik, termasuk dengan Dinas Kesehatan, BPBD, fasilitas kesehatan, serta instansi terkait lainnya dalam rangka respon terpadu terhadap kejadian KLB dan bencana. Dengan capaian sebesar 127%, indikator ini menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke telah mampu melaksanakan fungsi kewaspadaan dini dan respon cepat secara optimal, serta berkontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan pengendalian KLB serta dampak kesehatan akibat bencana. Ke depan, capaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem surveilans, peningkatan kualitas respon, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mendukung ketahanan kesehatan nasional.

b. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan survey vektor PES yaitu berupa kegiatan pemasangan perangkap tikus, serta penghitungan tingkat kepadatan serta identifikasi jenis tikus dan pinjal diwilayah perimeter, kegiatan dilaksanakan per 45 hari berdasarkan waktu perkembangbiakan tikus, kegiatan pemasangan perangkap dilakukan selama 4 hari berturut turut dengan memantau per hari hasil pemasangan perangkap serta melakukan pergantian umpan per 2 hari serta melakukan pergantian perangkap pada perangkap yang mendapatkan tikus sehingga jumlah perangkap terpasang tetap sama, kegiatan ini yang dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun dan Bandara Mopah Merauke serta 1 pos Pelabuhan laut Merauke, target Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 tahun 2025 adalah 54 dan Capaian Tahun 2025 66 sehingga Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1 adalah 122%.

c. Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan survey vektor Malaria (survey larva anopheles), kegiatan ini yaitu berupa survei larva anopheles di tempat tempat perindukan yang berada didaerah perimeter maupun buffer dengan cara dilakukan pencidukan menggunakan gayung pada tempat perindukan, melakukan perhitungan tingkat kepadatan larva anopheles serta

melakukan pengamatan tempat perkembangbiakan dengan melakukan pengukuran salinitas menggunakan alat Refraktometer untuk mengetahui ada tidaknya perubahan perilaku larva anopheles dalam pemilihan tempat perindukan, kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, Bandara Mopah dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke dengan hasil 7 lokasi tidak ditemukan larva anopheles(<1), target Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) tahun 2025 adalah 72 dan Capaian Tahun 2025 adalah 86 sehingga Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1) adalah 119%

d. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan survey kehidupan lipas yaitu melalui kegiatan pemasangan perangkap kecoa/lipas, kegiatan ini dilakukan diwilayah perimeter bersamaan dengan kegiatan inspeksi tempat fasilitas umum dimana satu hari sebelum melakukan inspeksi tempat fasilitas umum didaerah perimeter akan dipasang perangkap selama 1 x 24 jam dan hasilnya akan dilihat pada hari berikutnya pada saat inspeksi tempat fasilitas umum untuk menghitung tingkat kepadatan kecoa/lipas sehingga pada saat inspeksi tempat fasilitas umum dapat langsung memberikan rekomendasi jika indeks kepadatan kecoa/lipas > 2. Kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, bandara Mopah Merauke dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke dengan hasil 7 lokasi dengan Indeks populasi kecoa <2, target Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 Tahun 2025 adalah 60 dan capaian Tahun 2025 adalah 82 sehingga Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2 adalah 137%.

e. Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan survey vektor diare (Lalat), kegiatan ini yaitu melakukan survey tingkat kepadatan lalat yang dilakukan di TPS yang berada di daerah perimeter dan daerah buffer, perhitungan tingkat kepadatan lalat menggunakan alat fly grill dengan perhitungan TPS perwilayah perimeter maupun buffer sebanyak 10 kali per 30 detik dengan 5 hasil tertinggi dihitung rata rata dan didapatkan indeks populasi lalat di daerah perimeter dan buffer. Kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, bandara Mopah Merauke dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke dengan hasil 7 lokasi Indeks populasi lalat < 2, target Persentase bandara/pelabuhan Indeks populasi lalat < 2 tahun 2025 adalah 72

dan capaian Tahun 2025 adalah 83 sehingga Persentase bandara/Pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2 adalah 115%.

f. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan survey vektor DBD (larva aedes aegypti) dilakukan diwilayah perimeter, kegiatan ini yaitu melakukan pengamatan larva aedes Aegipty ditempat perindukan menggunakan senter untuk memudahkan dalam identifikasi awal bahwa larva tersebut adalah aedes aegipty yang merupakan vector penyakit demam berdarah, untuk penginputan hasil survey menggunakan aplikasi inovasi yang dibuat yaitu **SIDABOI** Sistem InfOrmasi pemantau jentIk**)** dengan menggunakan aplikasi SIDABOI ketepatan data hasil survey akan lebih mudah dan data akan tersimpan lebih aman dan selanjutnya di olah untuk mendapatkan perhitungan *House Indeks* jika hasil HI diatas 0 maka akan menjadi alarm untuk melakukan pengendalian baik larvasida maupun pengendalian nyamuk dewasa. Kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, bandara Mopah Merauke dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke, target Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 tahun 2025 adalah 72 dan Capaian Tahun 2025 adalah 86 sehingga Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0 adalah 119 %.

g. Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan survey vektor DBD (larva aedes aegypti) dilakukan diwilayah buffer, kegiatan ini yaitu melakukan pengamatan larva aedes Aegipty ditempat perindukan menggunakan senter untuk memudahkan dalam identifikasi awal bahwa larva tersebut adalah aedes aegipty yang merupakan vector penyakit demam berdarah, untuk penginputan hasil survey menggunakan aplikasi inovasi yang dibuat yaitu **SIDABOI** Sistem Informasi pemantau jentIk**)** dengan menggunakan aplikasi SIDABOI ketepatan data hasil survey akan lebih mudah dan data akan tersimpan lebih aman dan selanjutnya di olah untuk mendapatkan perhitungan *House Indeks* jika hasil HI diatas 1 maka akan menjadi alarm untuk melakukan pengendalian baik larvasida maupun pengendalian nyamuk dewasa. Kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, bandara Mopah Merauke dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke dengan hasil 1 lokasi dengan dengan HI buffer < 1 yaitu wilayah kerja PLBN Sota, target Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 Tahun 2025 adalah 10 dan Capaian Tahun 2025 adalah 13 sehingga Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1 adalah 130%.

h. **Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan**

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan hygiene sanitasi gedung dan bangunan diwilayah perimeter, kegiatan ini meliputi pemeriksaan kualitas air secara fisik, kualitas udara, kebersihan serta kepadatan vector penyakit DBD, malaria, diare serta PES untuk memastikan TTU di wilayah kerja BKK Merauke memenuhi syarat Kesehatan sesuai standar baku mutu Kesehatan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan di 6 wilayah Kerja yaitu Asmat, Bade, Wanam, PLBD Sota, PLBD Yetetkun, bandara Mopah Merauke dan 1 Pos yaitu Pelabuhan laut Merauke dengan hasil 87 lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan, target Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan tahun 2025 adalah 348 lokus dan capaian Tahun 2025 adalah 352 sehingga Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan adalah 101%.

i. **Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan**

Pada Capaian Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan inspeksi tempat pengolahan makanan di Pos bandara Mopah Merauke, target Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan Tahun 2025 adalah 116 lokus dan capaian Tahun 2025 115 sehingga Persentase lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan adalah 99%

j. **Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis.**

Pada Tahun 2025 dilaksanakan pemeriksaan lokus kualitas air bersih yaitu kegiatan pengambilan sampel air bersih diwilayah perimeter yang digunakan untuk umum, pengambilan sampel air bersih dilakukan dengan 2 perlakuan berbeda yaitu pengambilan sampel air untuk pemeriksaan bakteriologi yaitu dengan memastikan botol sampel air steril dan melakukan fiksasi pada saat pengambilan dan pengepakan sampel air untuk memastikan sampel air tidak terkontaminasi pada saat di kirimkan untuk pemeriksaan bakteriologi, untuk pengambilan sampel air untuk pemeriksaan kimia yaitu dengan melakukan pembilasan pada botol sampel air menggunakan sampel air yang akan diperiksa, pembilasan sebanyak 3 kali dengan tujuan sampel air dapat menyesuaikan botol sampel sama dengan tempat asli pengambilan sampel. Setelah dilakukan pengambilan sampel air baik untuk pemeriksaan bakteriologi dan kimia didikirimkan ke Labkesda Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan kimia dan bakteriologi secara lengkap sesuai standar baku mutu Kesehatan

lingkungan dimana target Tahun 2025 adalah 7 dan capaian Tahun 2025 7 sehingga hasil lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis adalah 100%.

Adapun hasil perhitungan capaian kinerja pada Indikator indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Rekap Capaian Kinerja pada Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk pada Tahun 2025

NO	Parameter	Bobot	Baseline	Coverage	Score	Maksimal	Cov Max	Score Max
1	2	3	4	5= (4/7)*100	6=3*5	7	8	9=3*8
1	Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%	5	100	100	500,00	100	100	500
2	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1	4	100	100	400,00	100	100	400
3	Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)	3	100	100	300,00	100	100	300
4	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2	4	100	100	400,00	100	100	400
5	Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2	4	100	100	400,00	100	100	400
6	Persentase bandara/pelabuhan dengan 1161 = 0	5	100	100	500,00	100	100	500
7	Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1	5	100	100	500,00	100	100	500
8	Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan	4	100	100	400,00	100	100	400
9	Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan	5	99	99	495,00	100	100	500
10	Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis	5	100	100	500,00	100	100	500
	Jumlah				4.395,00			4.400

Perhitungan Targetdan Capaian:

$$\text{Indeks} = \frac{4.395}{(4400-0)} = 1$$

- Target Tahun 2025 0,92
- Capaian Tahun 2025 1

  $$\text{Prestasi kerja} = \frac{1}{0,92} \times 100\% = 109\%$$

Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk dibalai kekarantinaan Kesehatan kelas II merauke pada Tahun 2025 adalah 1,0 dimana target tahun 2025 yaitu 0.92. Adapun Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dapat dilihat pada grafik:

Grafik 3.6
Perbandingan target dan realisasi indikator indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2025

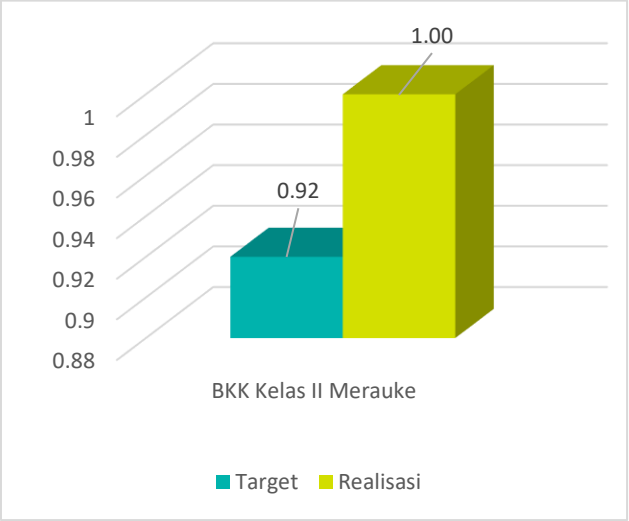

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks pengendalian factor risiko dipintu masuk lebih tinggi yaitu 1,0 dari target yang ditetapkan 0,92

2) Perbandingan realisasi kinerja indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Grafik 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

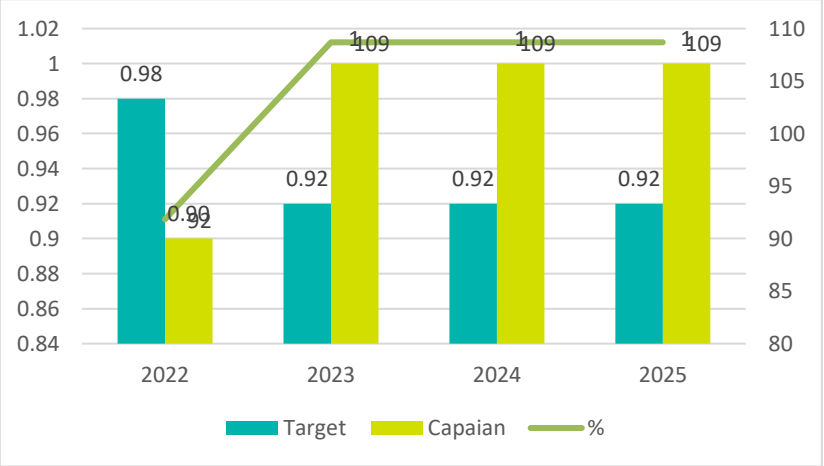

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian target indikator indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN tahun 2022 sebesar 92%, tahun 2023 sebesar 109%, tahun 2024 sebesar 109% dan tahun 2025 sebesar 109%.

Capaianindeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN tahun 2025 adalah sebesar 1,0 sama dengan capaian tahun 2024 sebesar 1, tahun 2023 sebesar 1, lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 0,90. Dari tampilan grafik diatas persentase capaian tahun 2025 sama dengan tahun 2024, 2023, dan lebih tinggi dari tahun 2022.

3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko Pelabuhan/Bandara/ PLBDN Tahun 2025 yangDibandingkan dengan Target Jangka Menengah(RAK 2025-2029)**

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN Tahun 2025 yang Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

Indikator	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Tahun 2025		
				Target	Capaian	Persentase
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	0.98	0.92	0.92	0,92	1,0	109%

Dari tabel dapat dilihat bahwa terjadi penurunan target indeks pengendalian faktor risikodi Pelabuhan / Bandara / PLBDN pada tahun 2023, 2024 dan 2025 dibanding tahun 2022, hal ini disebabkan karena capaian di tahun 2022 tidak dapat mencapai target indeks sebesar 0,98, oleh sebab itu target di tahun 2023, 2024 dan 2025 menjadi indeks 0,92. Untuk target indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN pada tahun 2025 dapat tercapai/melampaui target yang telah ditentukan.

4) **Perbandingan Realisasi Kinerja Satker dibandingkan Satker Lainnya yang Setara.**

Grafik 3.8
Perbandingan Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dengan Satker Sejenis

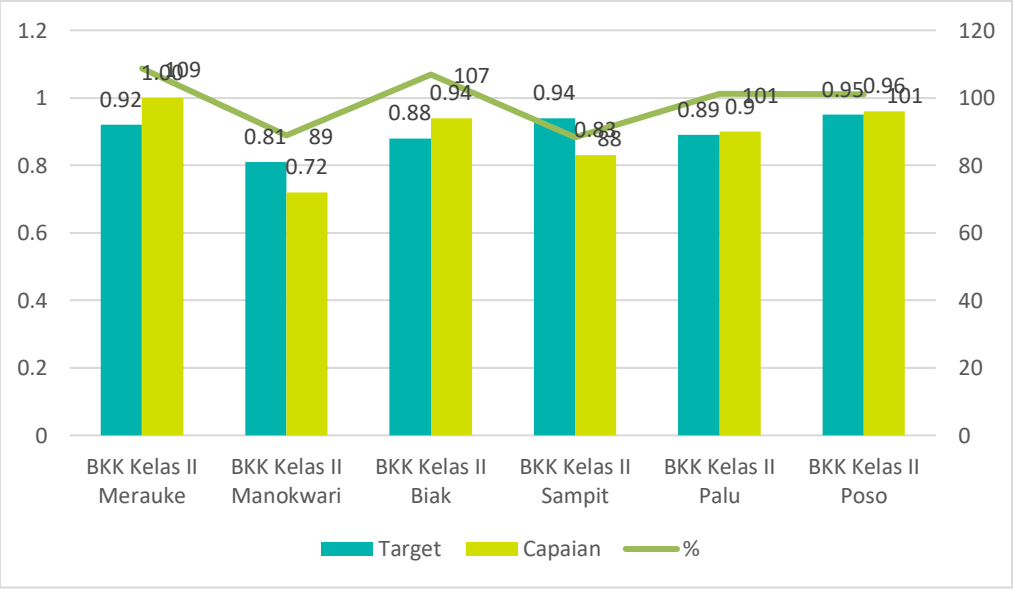

Persentase capaian Indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN BKK Kelas II Merauke tahun 2025 sebesar 109%, lebih tinggi dari BKK Kelas II Biak

108%, BKK Kelas II Manokwari 104%, BKK Kelas II Sampit 100%. BKK Kelas II Palu 101%, dan BKK Kelas II Poso 101%.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Membuat jejaring informasi, rapat koordinasi lintas sektor dan program secara berkala, dalam rangka cepat tanggap respon SKD KLB

2) Indeks Pinjal <1

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Indeks Pinjal tahun 2025 ditemukan pinjal umum, namun masuk dalam kategori rendah dan memenuhi syarat sesuai dengan baku mutu vaktor dan BPP menurut Permenkes Nomor 2 tahun 2023 yaitu Persentase tikus yang tertangkap oleh perangkap <1.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Edukasi kepada pemilik sarana dipelabuhan, Bandar Udara dan PLBN untuk memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- Pengangkutan sampah secara rutin setiap hari
- Melakukan pemasangan perangkap untuk mengendalikan populasi tikus

3) Tidak ditemukan larva *anopheles*

Berdasarkan hasil perhitungan capaian Survei larva *Anopheles* pada tempat perindukan pada tahun 2025 adalah 119%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Survei habitat larva *Anopheles* .
- Melakukan larvasida
- Memelihara ikan pemakan jentik

4) Indeks Kepadatan kecoak <2

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kepadatan Kecoak tidak ditemukanangka kepadatan > 2 adalah 137% upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah

- Survei Kecoak
- Perbaikan sanitasi lingkungan
- Edukasi kepada masyarakat untuk memelihara kebersihan lingkungan
- Masyarakat dan pemilik sarana melakukan pengendalian kecoak secara mandiri

5) Indeks kepadatan lalat < 2

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kepadatan lalat adalah 115%,upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan survei vektor diare setiap bulan
- Melakukan pengendalian untuk menekan populasi lalat jika ditemukan tingkat kepadatan lalat tinggi yaitu >2
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar dan pengunjung pelabuhan, Bandar Udara dan PLBN agar menyediakan tempat sampah yang memiliki penutup dan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan

6) Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI perimeter = 0

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI perimeter = 0 adalah 119 %, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan survei vektor DBD setiap bulan di wilayah perimeter
- Menghimbau *stake holder* di wilayah perimeter pelabuhan/bandara/ PLBN agar melakukan melaksanakan 3M+ (menguras, menutup, menyikat dinding penampungan air, *plus* menghindari gigitan nyamuk)
- menekan populasi vektor DBD jika hasil survey perimeter >0

7) Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI buffer <1

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Persentase bandara/ pelabuhan dengan HI buffer <1 adalah 130%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan survei vektor DBD setiap bulan di wilayah buffer
- Melakukan pengendalian untuk menekan populasi vektor DBD jika hasil survey buffer <1
- Mengimbau kepada masyarakat sekitar pelabuhan/ bandara/ PLBN agar rutin melaksanakan 3M+ (menguras, menutup, menyikat dinding penampungan air, *plus* menghindari gigitan nyamuk

8) TTU Memenuhi syarat

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TTU Memenuhi syarat adalah 101%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TTU
- Berkoordinasi dengan stake holder untuk menyiapkan sarana dan prasarana

TTU yang memenuhi syarat kesehatan

- Penggunaan TTU untuk memelihara dan menjaga kebersihan

9) TPP Laik Hygiene

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator TPM Laik Hygiene adalah 99%, upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

- Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap TPM
- Memberikan edukasi kepada pemilik Penjamah Makanan untuk menerapkan prinsip Hygiene sanitasi makanan
- Melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan (Hygiene test) secara berkala setiap 3 bulan
- Menyarankan kepada pemilik dan pengelola untuk menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat.

10) Kualitas air bersih memenuhi syarat Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator Kualitas air bersih diperoleh hasil 100% upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah melaksanakan pemeriksaan dengan mengkonsolidasikan anggaran kegiatan dengan kegiatan lainnya sehingga target tercapai.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Analisa penyebab keberhasilan adalah :

1) Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan lintas program
2) Desiminasi informasi hasil kegiatan kepada instansi terkait.
3) Menyediakan media KIE di pintu masuk.
4) Melakukan evaluasi monitoring secara berkala sesuai dengan RPD dan RPK

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1) Masih terbatasnya SDM terutama tenaga sanitarian dan entomologi khususnya di wilayah kerja mengakibatkan pelaksanaan kegiatan rutin pengendalian risiko lingkungan terkendala.
2) Kegiatan yang bersumber PNBP jumlah pelaksana yang menggunakan kader dibatasi sesuai dengan capaian PNBP.
3) Belum tersedianya laboratorium kesehatan lingkungan untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dengan pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/ bakteriologis di wilayah kerja, sehingga sampel harus dikirim ke laboratorium diluar Kabupaten Merauke. Hal ini berdampak kepada diperlukannya anggaran lebih untuk dapat membawa sampel,

sementara terdapat keterbatasan anggaran dan terdapat efisiensi anggaran sehingga berdampak pada pencapaian target.

h. Pemecahan Masalah

1) Melatih SDM di wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Merauke dan melakukan *transfer knowledge* untuk melaksanakan kegiatan pengendalian risiko lingkungan secara daring/ luring.
2) Pelaksanaan survei menggunakan ASN dan tenaga outsourcing.
3) Melaksanakan konsolidasi kegiatan agar target pemeriksaan kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan dengan pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/ bakteriologis di wilayah kerja tercapai.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut: Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.18
Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	30.843.000	30.693.000	99,51%	109%	71,76%

Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandarta/PLBDN telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 71,76%, dimana hal ini berarti bahwa dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,51%, dapat mencapai persentase capaian kinerja sebesar 109%.

INDIKATOR 4
Nilai Kinerja Anggaran

a. Pengertian

1. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
2. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran
3. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

b. DefInisi Operasional

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon I diperoleh melaluiperhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari :

1. Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi:
   a) Penggunaan SBK; dan/atau
   b) Efisiensi SBK.
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrument Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas:
   a) Revisi DIPA;
   b) Deviasi Halaman III DIPA;
   c) Penyerapan Anggaran;
   d) Belanja Kontraktual;
   e) Penyelesaian Tagihan;
   f) Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP);
   g) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM); dan
   h) Capaian Output.

c. Rumus Cara Perhitungan

50% Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran (yang terdiri 75% efektivitas + 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan perhitungan IKPA)**.**

d. Capaian indikator

Capaian kinerja indikator nilai kinerja anggaran pada Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 adalah 112%, dari target 83 terealisasi 97.50 Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.9
Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran BKK Merauke
TA 2023-2025

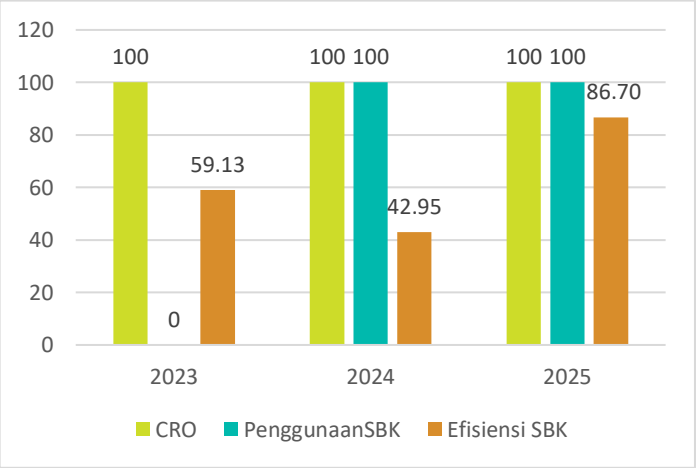

Sumber data : Laporan aplikasi smart kemenkeu bulan Desember 2025

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023, nilai penggunaan SBK adalah 0. Hal ini dikarenakan adanya perubahan parameter pengukuran pada tahun 2024. Penilaian kinerja perencanaan anggaran semula terdiri dari penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi dan nilai efisiensi sedangkan pada tahun 2024 hanya CRO, penggunaan SBK dan efisiensi SBK. Dari ketiga parameter yang diukur tersebut, nilai CRO dan penggunaan SBK selalu mencapai nilai maksimal 100. Akan tetapi, pada parameter efisiensi SBK terlihat bahwa capaian tahun 2025 adalah yang paling rendah yaitu 86.70. Hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran sebesar 50% pada kegiatan perjalanan dinas. maupun kegiatan pada RO SBK. Pada tahun 2024 BKK Merauke memiliki 34 CRO dan pada tahun 2025 sebanyak 30 CRO.

Grafik diatas juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, BKK Merauke mampu mencapai realisasi output sebesar 100%, penggunaan SBK 100% dan efisiensi SBK dengan nilai yang paling rendah. Memperhatikan posisi tersebut maka dapat diprediksi dapat mencapai target jangka menengah yang direncanakan.

1) Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran

Perbandingan capaian antara target dan realisasi indikator nilai kinerja anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.10
Target dan Realisasi Kinerja
Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

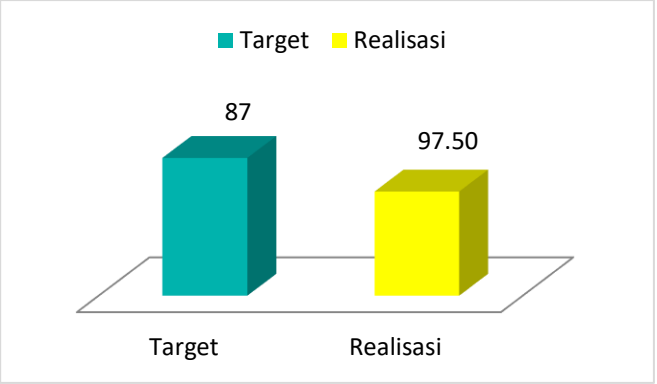

Dari grafik dapat kita lihat bahwa indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas II Merauke Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan dimana capain target Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh 97.50 sedangkan target Nilai Kinerja Anggaran adalah 87.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan target dan capaian Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas II Merauke dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.19
Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran
Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Nilai Kinerja Anggaran	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
	85	85	100%	85	88	104%	87	87	100%	87	94,75	109%	87	97.50	112,07%

Persentase kinerja RKA-K/L yang efektif dan efisien adalah hasil penilaian nilai kinerja anggaran dengan menggunakan tools aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaananggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Untuk memperoleh hasil kinerja anggaran dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran yakni suatu proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangkapeningkatan kinerja anggaran. Dari tabel dapat dilihat bahwa persentase capaian nilai kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 112%, lebih tinggi dari persentase capaian tahun 2024 sebesar 109%, tahun 2023 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 104%, dan tahun 2021 sebesar 100%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

Tabel 3.20
Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

Indikator	Tahun 2025		
	Target	capaian	persentase
Nlai Kinerja Anggaran	87	97,50	112%

Dari tabel dapat dilihat bahwa capaian tahun 2025 sebesar 97,50 telah mencapai/melampaui target nilai kinerja sebesar 87 (112%).

4) Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Grafik 3.11
Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 dengan Standar Nasional

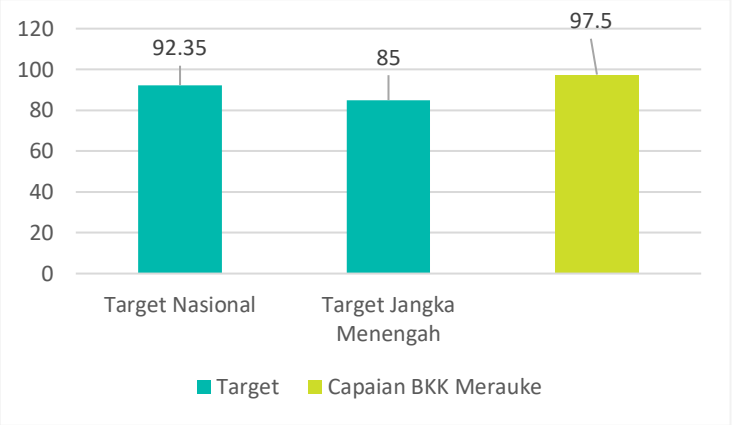

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi nilai kinerja anggaran BKK Kelas II Merauke tahun 2025 (97,50) lebih tinggi dari target Renstra Kemenkes 2025-2029 (92,3) dan target Drektorat Jenderal Penanggulangan Penyakit (80,01).

5) Perbandingan Realisasi Kinerja Satker dibandingkan dengan Satker Lainnya yang Setara

Tabel 3.21
Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BKK Merauke dibandingkan dengan dengan BKK Kelas II Biak , BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit

NO	INDIKATOR	Merauke			Biak			Manokwari			Sampit		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Nilai kinerja anggaran	87	97,50	112	87	99,61	114	83	96,16	116	85	98,03	115

Dari grafik dapat dilihat bahwa Persentase capaian target Nilai Kinerja Anggaran BKK Merauke Tahun 2025 sebesar 112% lebih rendah dari capaian target BKK Kelas II Biak 114%, target BKK Kelas II Manokwari (116%) dan lebih rendah dari BKK Kelas II Sampit (115%).

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah :

1) Melakukan Rekonsiliasi data, melakukan monitoring, evaluasi, melakukan pengisian emonev DJA, pemantauan atas rencana pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran secara berkala sehingga dapat meminimalisir adanya gap antara Rencana Penarikan Dana (RPD)/ RencanaPelaksanaan Kegiatan (RPK), dan koordinasi antara

Tim Kerja dengan penanggungjawab keuangan sehingga meminimalisir hambatan dalam proses pencairan anggaran;

2) Perlunya komitmen dalam melaksanakan kegiatan setiap bulan (sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana pelaksan kegiatan).

f. Analisa penyebab keberhasilan

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja anggaran di BKK Kelas II Merauke didukung oleh :

1) Penyusunan RPD dan RPK di awal tahun kegiatan;
2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan jadwal yangditentukan;
3) Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran yang dilaksanakan setiap bulan;
4) Implementasi penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan output;
5) Pelaksanaan evaluasi bulanan, triwulan dan semester terkait realisasi fisik dan anggaran.

g. Kendala/masalah

Yang menjadi permasalahan pada indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah :

1) Terdapat indikator yang dapat dihitung dalam periode satu tahun dengan target satu layanan, sehingga capaian indikator tidak dapat menggambarkansecara bulanan;
2) Realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana penarikan dana;
3) Kegiatan yang bersumber dari PNBP telah dilakukan akan tetapi pencairan anggarannya menunggu sampai dana PNBP terkumpul untuk dapat direalisasikan;
4) Laporan capaian output tidak selalu tepat waktu disampaikan;
5) Proses revisi yang dilakukan memerlukan waktu yang berakibat pada tidak konsistensinya RPD.

h. Pemecahan Masalah

1) Mengisi progress capaian keluaran setiap bulannya, sehingga walaupun volume layanan belum tercapai namun tetap ada keterangan progres kegiatan;
2) Dilakukan rekon dalam rangka monitoring atas capaian kinerja, realisasikegiatan dan rencana kegiatan bidang/bagian;
3) Kepala Balai memberikan sanksi bagi Subbagian Adum, Tim Kerja dan dan Wilayah Kerja yang terlambat menyampaikan laporan setiap bulan;
4) Melakukan perencanaan yang baik untuk tahun 2025, sehingga revisi anggaran tidak berulang kali dilakukan.

i. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakannuntuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.22
Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	218.521.000	217.530.266	99,55%	112%	77,80%

Indikator indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandarta/PLBDN telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 77,80%, dimana berarti nilai kinerja lebih tinggi dari pada realisasi anggaran. Hal ini berarti dengan realisasi anggaran sebesar 99,55%, realisasi capaian kinerja adalah 112%.

INDIKATOR 5
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

a. Pengertian

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukurkualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

b. Defenisi Operasional

Ukuran kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Rumus/Cara perhitungan

Nilai agregat dari revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output.

d. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai IKPA dapat dipantau secara periodik pada aplikasi OMSPAN Kemenkeu. Monitoring pelaksanaan anggaran belanja merupakan kewajiban kementerian/lembaga dalam melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Anggaran Belanja. Monitoring dilaksanakan untuk memantau data pelaksanaan anggaran belanja dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul serta memperbaiki tata kelola anggaran. Hasil monitoring pelaksanaan anggaran belanja dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran melalui perbandingan nilai kualitas kinerja antar unit organisasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 3.23

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator	Tahun 2025		
	Target	Capaian	Persentase
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	96.98	102,08%

Grafik 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

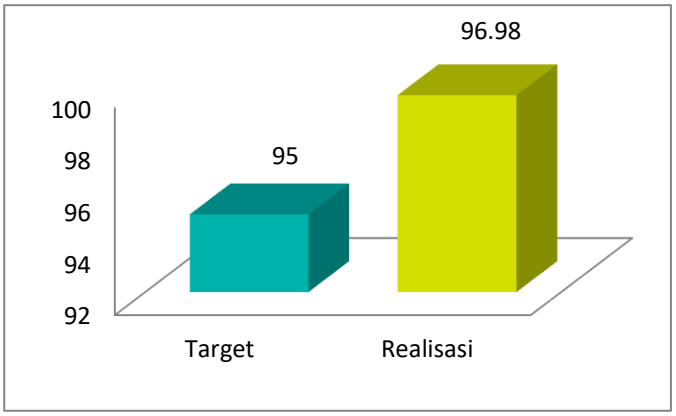

Capaian nilai IKPA tahun 2025 sebesar 96.98 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 95 sehingga pencapaian kinerja sebesar 102,08%. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan.

2) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.24
Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	C	%	T	C	%	T	C	%	T	C	%
Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara	0,98	0,9	92%	0,92	1	109%	0,92	98,06	103%	95	96.98	102%

Dari tabel dapat dilihat bahwa target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2025 sebesar 95 dengan nilai capaian 96.98 (102%) lebih tinggi dari tahun 2023 dengan target sebesar 95 dengan nilai capaian 96 (101%), lebih tinggi dari capaian target tahun 2022 sebesar 97%.

3) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

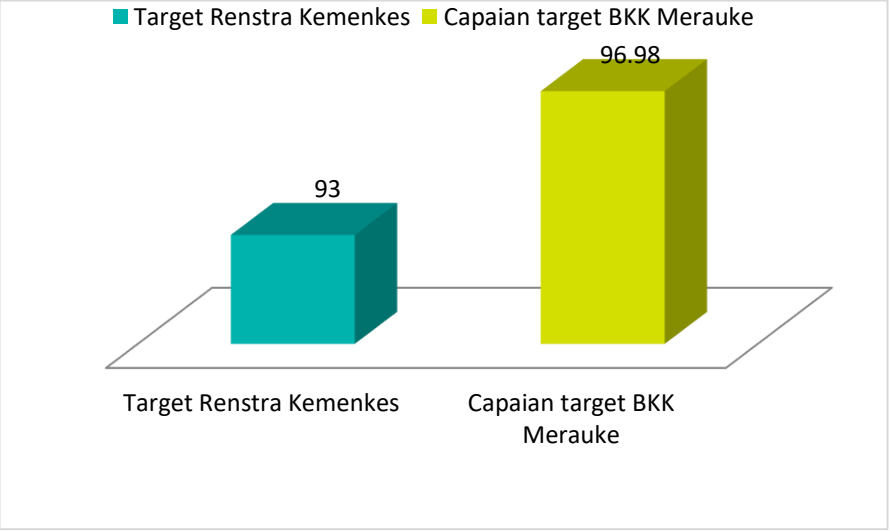

Dari grafik dapat dilihat bahwa target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke 95 dan capaian target sebesar 96.98 (102,08%).

4) **Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2025 dengan standar Nasional**

Grafik 3.13
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2025 dengan Standar Nasional

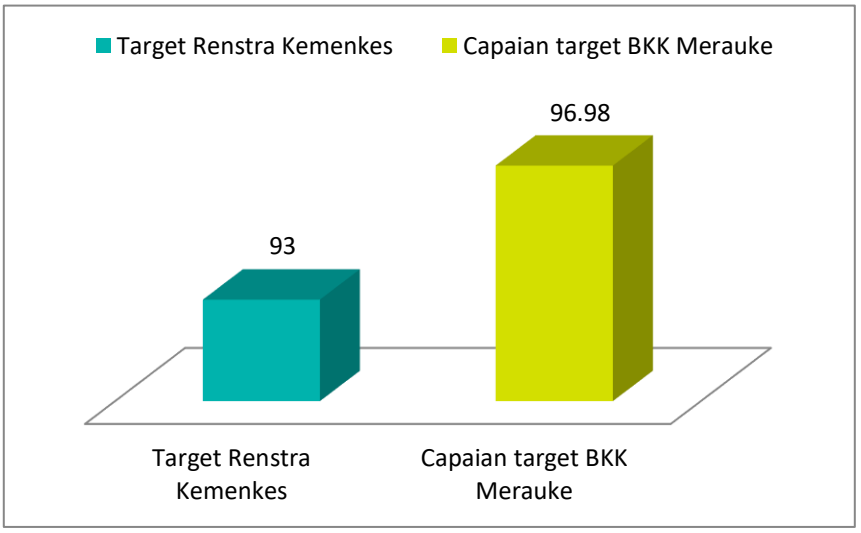

Dari grafik dapat dilihat bahwa capaian target BKK Kelas II Merauke pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 sebesar 96,98 telah melebihi target pada Renstra Kementerian Kesehatan yaitu 93. Secara tidak langsung dapat disimpulkan, BKK Kelas II Merauke telah berkontribusi dalam pencapaian target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran secara nasional.

5) **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Satker lain**

Grafik 3.14
Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 BKK Merauke dengan BKK Kelas II Biak , BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit

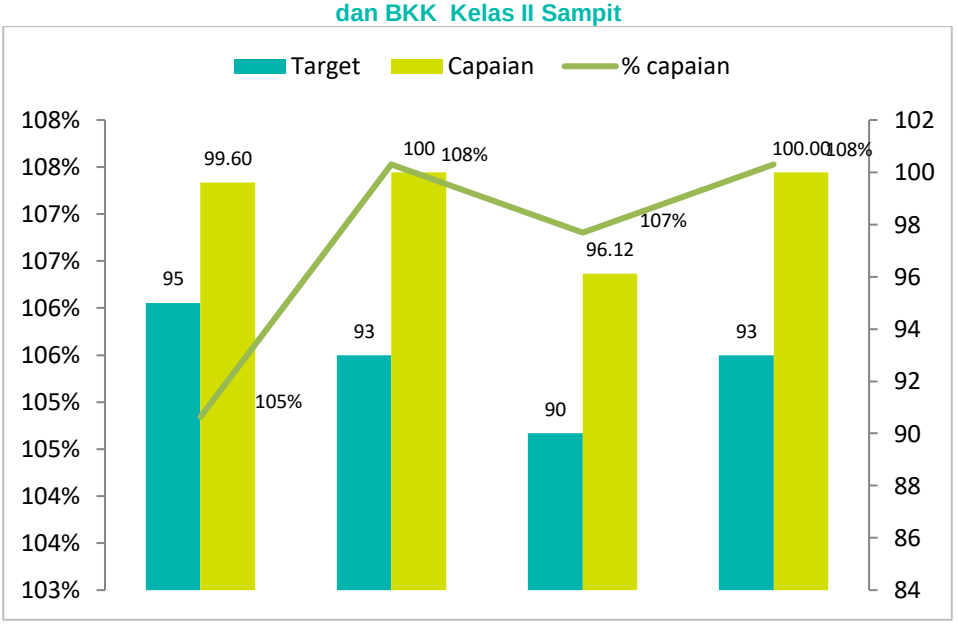

Dari grafik dapat dilihat bahwa persentase capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKK Merauke sebesar 105% lebih rendah dari persentase capaian

nilai IKPA BKK Kelas II Biak (108%), BKK Kelas II Manokwari (107%), dan BKK Kelas II Sampit (108%). Tetapi dari 4 (empat) satker, BKK Merauke adalah satker dengan target IKPA tertinggi (95) dibandingkan dengan satker lainnya.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Mengurangi pelaksanaan Revisi DIPA
2) Tidak terdapat pagu minus pada transaksi keuangan
3) Kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan
4) Tidak ada perbedaan rekonsiliasi internal Modul Persediaan, Modul Asetdengan Modul GLP

f. Analisa penyebab keberhasilan

Indikator ini mencapai target dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain

a) Revisi DIPA dilakukan secara efektif;
b) Tidak adanya dispensasi SPM;
c) Ketelitian dalam penerbitan SPM;
d) Pencairan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai denagn target penyerapan anggaran;
e) Data kontrak disampaikan tepat waktu ke KPPN;
f) Revolving UP dan Pertanggungjawaban TUP dilakukan tepat waktu;
g) Efektif dalam hal perhitungan pencapaian output

g. Permasalahan

a) Adanya kebijakan self blocking perjalanan dinas yaitu anggaran SBK.
b) Inkonsistensi RPK/RPD dan penginputan realisasi yang tidak tepat waktu khususnya pada triwulan pertama dan beberapa bulan lainnya.
c) Keterlambatan pengiriman laporan pertanggungjawaban kegiatan dari pelaksana di wilayah kerja.

h. Pemecahan Masalah

1) Melakukan kegiatan secara terintegrasi dengan kegiatan lain yang anggarannya tidak mengalami self blocking.
d) Meningkatkan konsistensi RPK/RPD dan penginputan realisasi yang tepat waktu setiap bulan.
2) Mendorong pengiriman laporan pertanggungjawaban kegiatan yang tepat waktu dari pelaksana kegiatan di wilayah kerja.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakannuntuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021

tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran.

Adapun langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.26
Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	7.993.766.000	7.780.874.179	97,34%	102%	61,43%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 61,43%, dimana berarti nilai kinerja lebih tinggi dari pada realisasi anggaran. Hal ini berarti dengan realisasi anggaran sebesar 97,34%,realisasi capaian kinerja adalah 102%.

INDIKATOR 6
Kinerja Implementasi WBK Satker

a. Pengertian

Zona integritas menuju WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM merupakan tindak lanjut dari pencanangan ZI. Terdapat 2 komponen penilaian, yaitu komponen pengungkit yang terdiri dari 6 indikator kinerja (dengan 2 kegiatan pemenuhan dan reform pada masing-masing indikator) serta komponen hasil yang berasal dari survei persepsi masyarakat dan capaian kinerja.

b. Definisi operasional

perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian Mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evauasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

c. Rumus/Cara perhitungan

Nilai kinerja implementasi satker menuju wilayah bebas dari korupsi ditentukan melalui penilaian oleh Tim Penilai Internal Kementerian Kesehatan RI ataupun Tim Penilai Nasional dari Kemenpan RB. Nilai implementasi WBK satker dihitung dari akumulasi nilai total pengungkit (aspek pemenuhan dan reform) dan nilai total hasil (birokrasi yang bersih dan akuntabel, pelayanan pulik yang prima).

d. Capaian Indikator

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, pada tanggal 31 Oktober 2025 telah dilakukan Self-Assessment Pembangunan ZI menuju WBK pada satuan kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke. Adapun ringkasan hasil evaluasi sebagai Berikut :

Tabel 3.27
Tabel Hasil Assessment Eselon I

No.	MATERI	NILAI	REKOMENDASI PERBAIKAN
I	**KOMPONEN PENGUNGKIT**	**60**	**59,29**
A.	**Aspek Pemenuhan**	**30**	29,63
1	Manajemen Perubahan	4	4
2	Penataan Tatalaksana	3,5	3,5
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	4,63
4	Penguatan Akuntabilitas	5	5
5	Penguatan Pengawasan	7,5	7,5
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5
B.	**Aspek *Reform***	**30**	**29,67**
1	Manajemen Perubahan	4	4
2	Penataan Tatalaksana	3,5	3,5
3	Penataan Sistem manajemen SDM	5	5
4	Penguatan Akuntabilitas	5	5
5	Penguatan Pengawasan	7,5	7,17
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5
II	**KOMPONEN HASIL**	**40**	**37,77**
1	**Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**	**22,5**	**21,23**
a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei	17,5	16,23
b.	Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	5
2.	**Pelayanan Publik yang Prima**	**17,5**	**16,54**
	Nilai Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (Survey eksternal)	17,5	16,54
TOTAL NILAI		**100**	**97,06**

1) Perbandingan Target dengan Realisasi implementasi WBK tahun 2025

Tabel 3.28
Perbandingan Target dengan Realisasi
implementasi WBK Tahun 2025

Target	Realisasi	Persentase
80	**97,06**	**121%**

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 3.16
Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Tahun 2025
dengan tahun sebelumnya

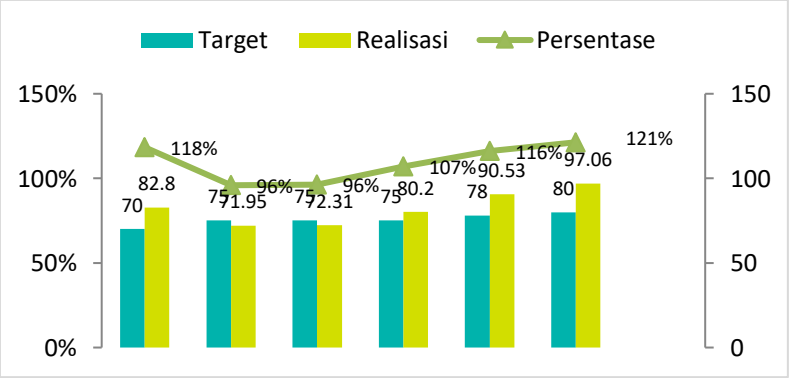

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi target implementasi WBK Tahun 2025 (97,06) lebih tinggi dari tahun 2024 (90,53). tahun 2023 (80,82), tahun 2022 (72,31), tahun 2021 (71,95), dan tahun 2020 (82,8). Hal ini menunjukkan bahwa komitmen BKK Kelas II Merauke dalam mewujudkan implementasi WBK Satker semakin maksimal dan diharapkan tahun 2026 BKK Merauke dapat meningkatkan komitmen implementasi WBK sehingga dapat diusulkan oleh eselon 1 untuk penilaian WBK Nasional.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

Grafik 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

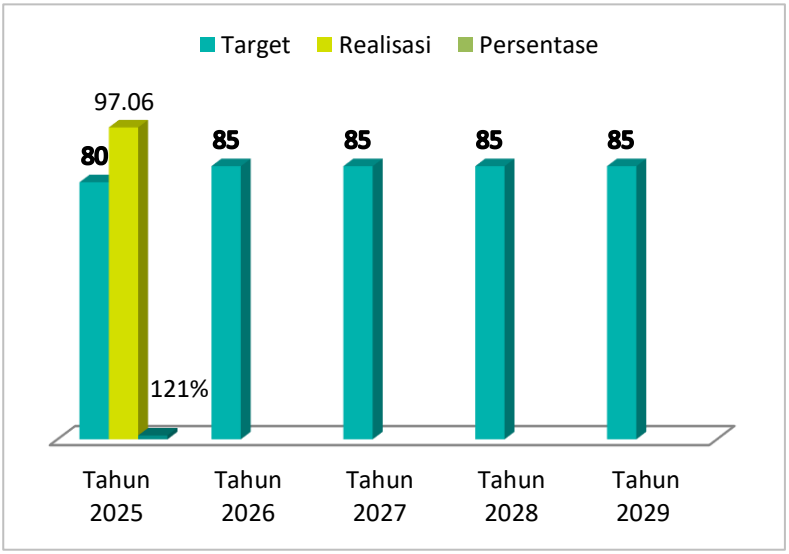

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi kinerja implementasi WBK tahun 2025 adalah 97,06, hasil tersebut telah melampaui proyeksi target tahun 2027 (85) dan proyeksi target tahun 2029 (85). Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke berupaya untuk mencapai target WBK Nasional dengan berkomitmen menetapkan standar target nilai WBK di tahun 2026 s/d 2029 adalah 85 (sesuai nilai standar WBK Nasional), saat ini dibutuhkan usaha dan kerja keras lebih untuk memenuhi standar satuan kerja yang memenuhi kriteria WBK Nasional.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK dengan standar nasional

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dengan Standar Nasional

	Tahun 2025	Target Nasional
Target	80	75
Realisasi	97,06	

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi kinerja implementasi WBK Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke (97,06) telah melampaui target nasional (75), hal ini menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke berkomitmen untuk mewujudkan satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

5) Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK dengan Satker Lainnya

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja Implementasi WBK
dibandingkan dengan Satker yang Sejenis

NO	INDIKATOR	BKK Kelas II Merauke			BKK Kelas II Biak			BKK Kelas II Manokwari			BKK Kelas II Sampit			BKK Kelas II Palu			BKK Kelas II Poso		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1.	Kinerja implementasi WBK satker	80	97,06	121%	76	92,39	122%	75	93,33	124%	82	93,38	114%	80	90,88	115%	76	67,63	89%

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi target penilaian WBK Tahun 2025 BKK Merauke (97,06), lebih tinggi dari BKK Kelas II Biak (92,39), BKK Kelas II Manokwari (93,33), BKK Kelas II Sampit (93,38), BKK Kelas II Palu (90,88), dan BKK Kelas II Poso (67,63). Data tersebut menunjukkan bahwa BKK Merauke , BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari, BKK Kelas II Sampit dan BKK Kelas II Palu telah membuktikan komitmen untuk melaksanakan implementasi WBK di lingkungan kerja masing masing dengan mendapatkan nilai implementasi WBK di atas target yang telah ditentukan.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Menyusun komitmen bersama dalam bentuk kegiatan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2025.
2) Masing-masing kelompok kerja tim WBK menyusun rencana kerja kegiatan di awal tahun.
3) Melakukan evaluasi atas program kerja yang telah dilakukan.
4) Melaksanakan sosialisasi dan kampanye zona integritas.

5) Menggunakan atribut WBK.

6) Melaksanakan self assessment setiap triwulan untuk mengetahui progres pembangunan ZI

7) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Eksternal setiap triwulan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Indikator kinerja implementasi WBK dapat dilaksanakan dengan baik (97,06) dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (80). Berikut disampaikan penyebab keberhasilan pencapaian target indikator :

1) Komitmen dari pimpinan untuk mewujudkan BKK Merauke berpredikat satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
2) Komitmen dan motivasi dari para tim kerja untuk memperoleh redikat satker menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) semakin meningkat
3) Kapasitas SDM yang memiliki semangat kerja tim yang tinggi

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1) Seiring perkembangan dan upaya untuk terus berbenah maka instrumen yang digunakan mengalami pergeseran dan semakin detail dan terukur
2) Seringkali hal-hal kecil terlewat untuk didokumentasikan.
3) Adanya stigma masyarakat dan kepercayaan akan instansi pemerintah yang masih rendah.
4) Wilayah kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tersebar di 4 (empat) kabupaten, hal ini menjadi salah satu kendala dalam menghidupkan ruh WBK sampai ke seluruh sendi pegawai yang ada di wilayah kerja.
5) Terdapat hasil survei eksternal WBK (survey eksternal tentang persepsi kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi) yang belum memenuhi standar penilaian.

h. Pemecahan Masalah

BKK Merauke mengambil langkah pemecahan masalah terkait kendala tersebut diatas sebagai berikut :

1) Melaksanakan update instrumen pengukuran dan upaya perbaikan yang berkesinambungan.
2) Mendokumentasikan setiap kegiatan dan peristiwa sedetail mungkin.
3) Melaksanakan sosialisasi kepada pengguna jasa bahwa Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke siap menuju WBK/WBBM.
4) Senantiasa mengukur indeks kepuasan masyarakat.
5) Mengikuti sosialisasi dan peningkatan kapasitas pengelola kegiatan agar memperkaya pengetahuan guna perbaikan dan penyusunan inovasi kegiatan.

6) Melaksanakan rapat koordinasi rutin dan publikasi program melalui whastapp grup dengan wilayah kerja mengenai program WBK yang telah diterapkan.

i. Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.29
Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi Indikator Implementasi WBK

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	59.547.000	59.355.500	99,68%	121%	94,05%

Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 94,05%, dimana berarti nilai kinerja lebih tinggi dari pada realisasi anggaran. Hal ini berarti persentase capaian kinerja tercapai 121% dengan menggunakan realisasi anggaran sebesar 99,68%.

INDIKATOR 7
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya dalam satu tahun

a. Pengertian

Suatu proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, ataupun meningkatkan kinerja pegawai, khususnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.

b. Defenisi Operasional

ASN yang ditingkatkan kompetensinya paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional. Pengembangan kompetensi pegawai dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan klasikal yaitu tatap muka di kelas, dan pelatihan non klasikal yaitu praktik kerja/pembelajaran luar kelas.

c. Rumus/Cara perhitungan

Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN.

d. Capaian Indikator

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025

Grafik 3.18
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Tahun 2025

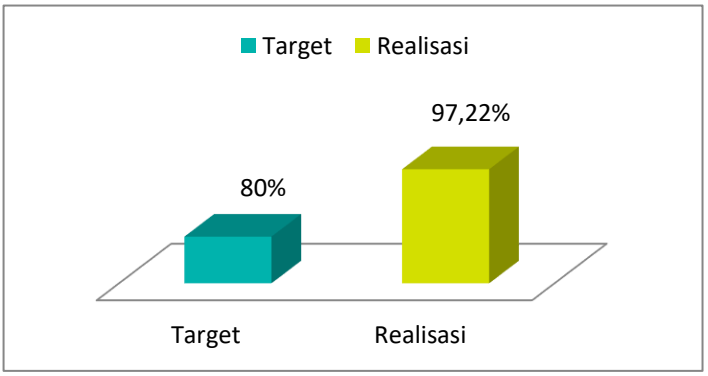

Dari grafik dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 persentase ASN BKK Merauke yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 20 JPL adalah 35 orang dari 36 ASN (97,22%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Grafik 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

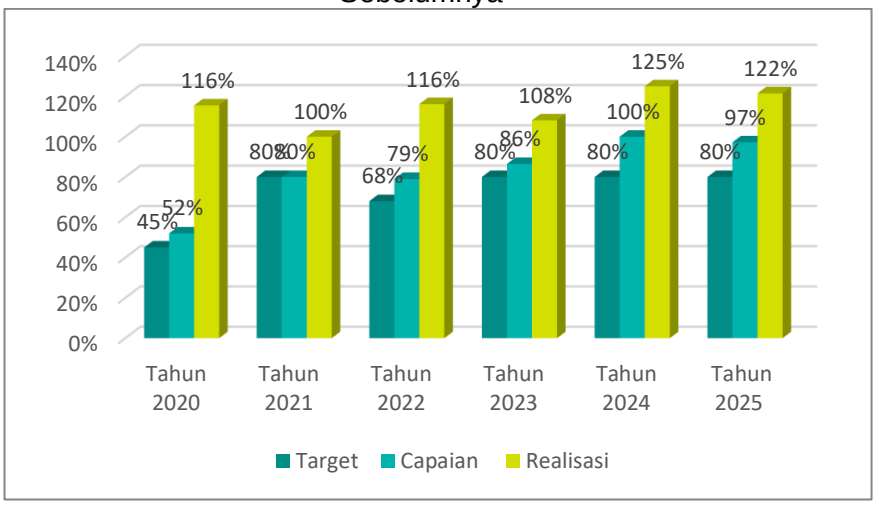

Berdasarkan persentase capaian target ASN yang ditingkatkan kompetensinya, Capaian Tahun 2025 122%) lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2024 (125%), dan lebih tinggi dari tahun 2023 (108%), tahun 2022 (116%), tahun 2021 (100%), dan tahun 2020 116%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah(RAK 2025-2029)

Grafik 3.20

Realisasi Kinerja Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah(RAK 2025-2029)

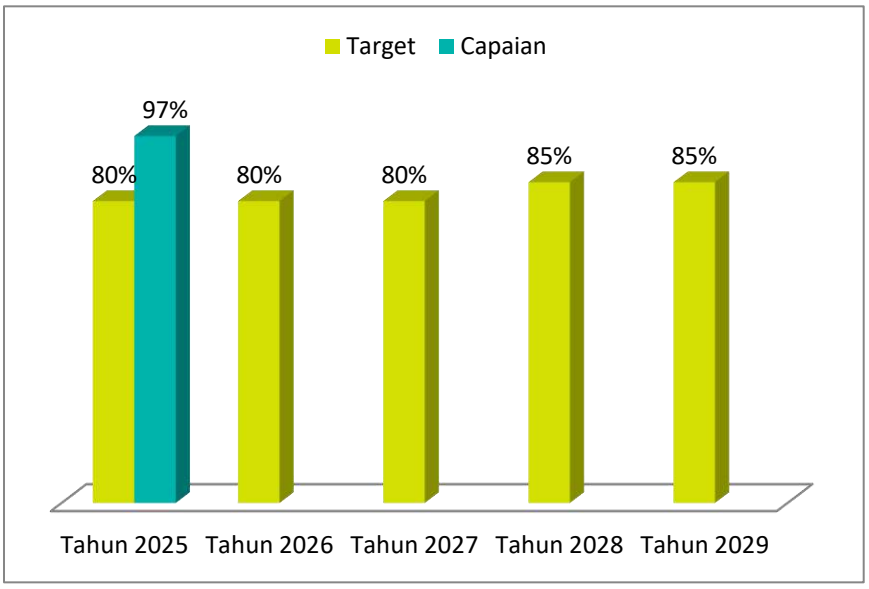

Berdasarkan data pada tabel diatas realisasi capaian Peningkatan ASN yang ditingkatkan kompetensinya Tahun 2025 adalah 97%, melebihi target yang ditentukan dalam RAK 2025-2029.

4) Perbandingan Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya dibandingkan dengan Standar Nasional

Tabel 3.31
Perbandingan Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya dibandingkan dengan Standar Nasional

Target Renstra Kemenkes Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Realisasi BKK Merauke Jumlah ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
4280 ASN	35 ASN

Berdasarkan data pada tabel, dari target Renstra Kemenkes sebanyak 4280 orang ASN yang ditingkatkan Kompetensinya, BKK Merauke telah berkontribusi sebanyak 35 ASN yang telah ditingkatkan kompetensinya.

5) Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Dibandingkan dengan Satker Lainnya

tabel 3.32
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase ASN

yang Ditingkatkan Kompetensinya BKK Merauke dengan BKK Kelas II Biak, BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit

NO	INDIKATOR	Merauke			Biak			Manokwari			Sampit		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
g.	Perentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	**80%**	**97,22%**	**122%**	80%	100%	125%	74	91,67	124%	85%	100%	118%

Persentase capaian target ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Tahun 2025 BKK Merauke (122%) lebih rendah dari capaian target BKK Kelas I Biak (125%), BKK Kelas II Manokwari 124% dan lebih tinggi dari BKK Kelas II Sampit 118%.

e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Merencanakan dan menganggarkan peningkatan SDM setiap tahun
2) Melakukan bimbingan teknis di wilayah kerja
3) Meningkatkan kemampuan pegawai untuk belajar mandiri

f. Analisa Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan dari indikator peningkatan kapasitas SDM adalah :

1) Tersedianya anggaran untuk upaya peningkatan SDM
2) Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pegawai untuk meningkatkan SDM

g. Kendala/masalah yang dihadapi

1. Perencanaan anggaran yang direncanakan untuk upaya peningkatan SDM tidak terpenuhi
2. Upaya peningkatan SDM dalam bentuk e-learning terkadang terhambat oleh jaringan internet yang tidak memadai terutama bagi pegawai yang bertugas diwilayah kerja

h. Pemecahan Masalah

1) Pejabat struktural dan pegawai yang berkompeten melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis diwilayah kerja
2) Pejabat struktural dapat menjadi coaching di kantor

dengan tujuan meningktkan wawasan dan kapasits SDM

3) Membuat perencanaan peningkatan ASN setiap tahun

i) Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.33
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya

Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	0	0	122%	50%

1. Indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 50%, dimana berarti nilai kinerja lebih tinggi dari pada realisasi anggaran. Hal ini berarti bahwa persentase capaian kinerja dapat tercapai 122% sekalipun tidak terdapat anggaran untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Capaian tersebut disebabkan karena masing-masing pegawai dapat mencari solusi peningkatan SDM secara daring yang tidak membutuhkan anggaran atau ada beberapa pegawai yang meningkatkan kompetensi tidak menggunakan APBN tetapi menggubakan anggaran pribadi.

8. Persentase Realisasi Anggaran

j. Pengertian

Indikator persentase realisasi anggaran adalah persentase hasil realisasi pendapatan, belanja transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

k. Defenisi Operasional

Indikator persentase realisasi anggaran adalah persentase capaian realisasi anggaran selama kurun waktu yang sama

l. Rumus/Cara perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah persentase reaslisasi anggaran dalam kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah target persentase reaslisasi anggaran dalam kurung waktu yang sama}} \times 100\%$$

m. Capaian Indikator

1) **Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Grafik 3.21
Perbandingan Target dengan Realisasi
Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025

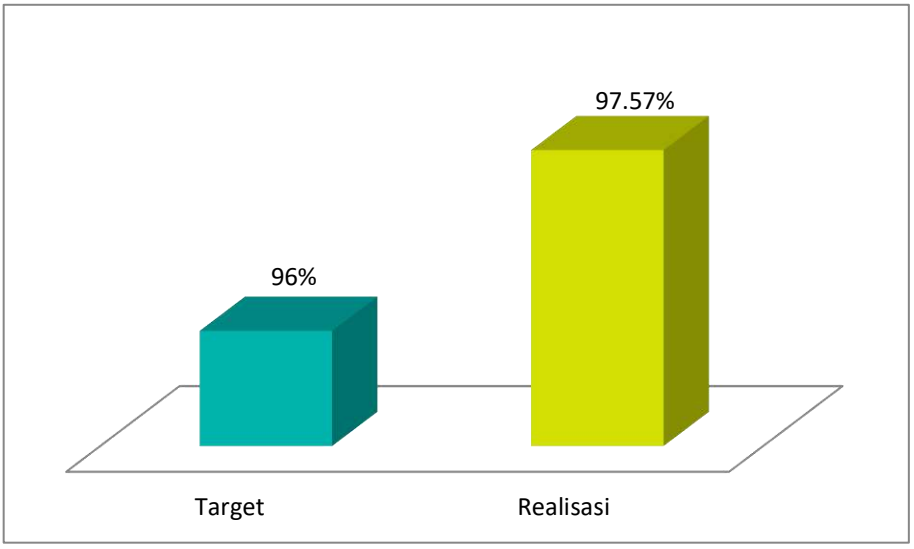

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi anggaran sebesar Rp.8.736.241.530 (97,57%) dari pagu Rp. 8.954.090.000 hal ini menunjukkan bahwa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II telah mencapai target yang telah ditentukan namun tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Direktur jenderal Penanggulangan Penyakit sebesar 99%.

2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya**

Grafik 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Realisasi
Anggaran tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

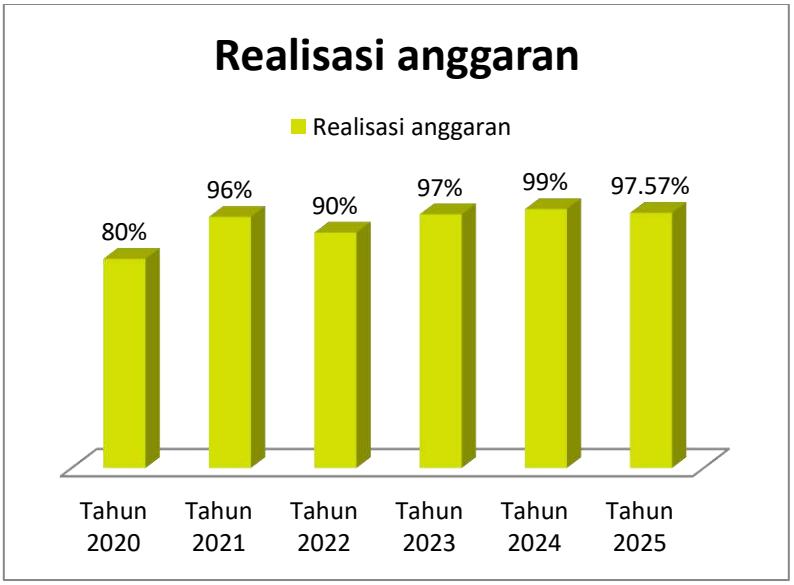

Berdasarkan persentase realisasi target indikator realisasi anggaran Tahun 2025 (97,57) masih dibawah capaian target tahun 2024 sebesar 99%, hal ini disebabkan karena:

a) adanya tambahan anggaran gaji 2 orang tenaga P3K sebesar Rp.45.712.000 dan tenaga P3K tersebut mengundurkan diri untuk ditempatkan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.
b) Terdapat 2 orang PNS pindah tukas ke BBKK Medan dan BBKK Tanjung Priok sehingga alokasi anggaran gaji tidak terealisasi 100%

3) Perbandingan realisasi kinerja indikator persentase Realisasi tahun 2025 dengan Rencana Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

Grafik 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dengan Rencana Jangka Menengah (RAK 2025-2029)

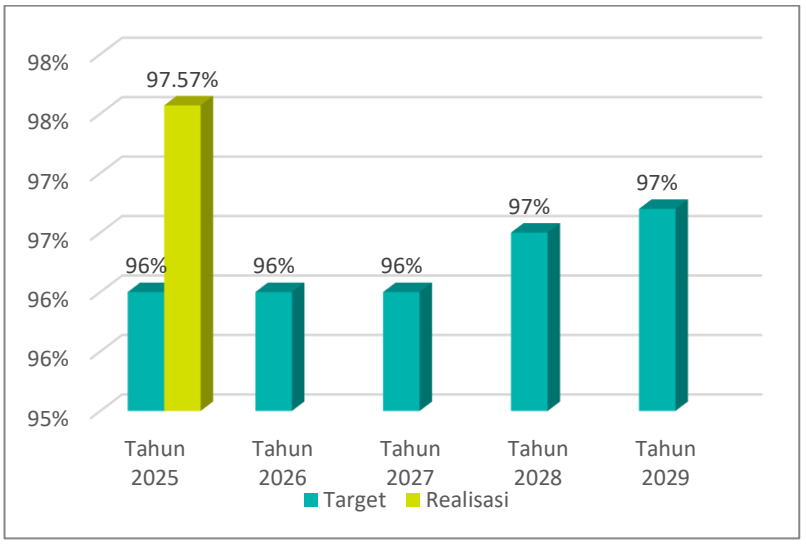

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi indikator persentase realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 97,57%, telah mencapai target yang ditentukan pada Rencana Aksi tahun 2025 sebesar 96% dan diharapkan realisasi anggaran tahun 2026-2029 dapat melampaui target tahun 2029-2029.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Satker dibandingkan Satker lainnya

Tabel 3.34

Perbandingan persentase realisasi anggaran tahun 2025 BKK Merauke yang dibandingkan dengan BKK Kelas II Biak , BKK Kelas II Manokwari dan BKK Kelas II Sampit

NO	INDIKATOR	Merauke			Biak			Manokwari			Sampit		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase realisasi anggaran	**96%**	**97,57%**	**102%**	96%	99,88%	104%	96	99,36	104%	96%	99,33%	103%

Persentase realisasi anggaran tahun 2025 BKK Merauke (102%%) lebih rendah dari realisasi anggaran BKK Biak (104%), BKK Kelas II Manokwari (104%) dan BKK Kelas II Sampit (103%). Proyeksi realisasi anggaran BKK Merauke tahun 2025 adalah 98%.

n. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

1) Konsistensi dalam melaksanakan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) danRencana Penarikan Dana (RPD)
2) Menjaga nilai indikator, Deviasi, Halaman III DIPA dengan cara menyesuaikan penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana dalam halaman III DIPA
3) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sekaligus Rencana Penarikan Dana untuk setiap triwulan dengan lebih akurat serta mengajukan pemutakhiran RPD di Halaman III DIPA melalui mekanisme Revisi DIPA ke Kanwil apabila diperlukan.
4) Meningkatkan realisasi anggaran sesuai target yang sudah ditetapkan setiapTriwulan
5) Pengelolaan UP/TUP dengan memperhatikan Revolving UP (pengajuan SPM GUP), memastikan dalam setiap pengajuan TUP harus habis dipergunakan seluruhnya, sehingga tidak ada sisa setoran TUP.

f. Analisa penyebab keberhasilan

Pencapaian indikator persentase realisasi anggaran yang menunjukan hasil yang mendekati target, dimana mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya. Adapun hal yang mempengaruhi pencapaian target indikator tersebut adalah:

1) Meningkatnya monitoring kegiatan;
2) Meningkatnya konsistensi RPK/RPD; dan
3) Meningkatnya penerimaan PNBP

g. Kendala/Masalah

1) Terdapat blokir anggaran
2) Beban kerja dan keterbatasan jumlah SDM baik dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana operasional kegiatan dan pengelolaan kegiatan khususnya di awal tahun anggaran.
3) Keterlambatan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari pelaksana kegiatan.

h. Pemecahan Masalah

BKK Merauke mengambil langkah pemecahan masalah dengan melakukan :

1) Melaksanakan kegiatan rutin menggunakan anggaran yang tersedia (tidak terkunci untuk efisiensi) sehingga anggaran yang tersedia akan lebih cepat terlaksana dan tidak menimbulkan efek terkejut saat anggaran efisiensi dikembalikan ke satker.
2) Mendorong peningkatan jumlah SDM baik dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana operasional kegiatan dalam mengelola kegiatan khususnya di awal tahun anggaran melalui pengusulan CPNS dan CP3K.
3) Mendorong pelaksana kegiatan untuk mempercepat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
4) Melakukan evaluasi dan monitoring atas kesesuaian realisasi penarikan dengan rencana penarikan setiap bulan
5) Melakukan monitoring dan evaluasi capaian output kegiatan yang berkaitan dengan capaian kinerja anggaran.

i. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya yang digunakan saat ini adalah efisiensi anggaran, rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi sumber daya berasal dari PKK 11/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Pelaksanaan RKA sebagai berikut :

Langkah-langkah untuk menghitung efisiensi rincian output dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi rincian output

PAKi : Pagu Anggaran Kinerja Indikator

CKi : Capaian Kinerja Indikator

RAKi : Realisasi Anggaran Kinerja Indikator

Langkah untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya:

1. Identifikasi Rincian Output (RO) apa saja yang mendukung tercapainya indikator
2. Hitung pagu dan realisasi anggaran
3. Hitung capaian kinerja
4. Hitung efisiensi sesuai rumus
5. Hitung nilai efisiensi

Dapat dihitung dengan rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi Rincian Output

Tabel 3.35

Tabel Perhitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAK) (Rp)	Realisasi Anggaran Keluaran (CAK) (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Kinerja	Nilai Efisiensi
Persentase Realisasi Anggaran	135.090.000	131.844.285	97,60%	102%	60,79%

Indikator Persentase Realisasi Anggaran telah berjalan efisien dengan nilai efisiensi sebesar 60,79%, dimana berarti nilai kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini berarti persentase capaian kinerja tercapai 102% dengan menggunakan realisasi anggaran sebesar 97,60%.

B. SUMBER DAYA ANGGARAN

Sumber Daya Anggaran Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-024.05.2.416057/2024 tanggal 2 Desember 2024, anggaran BKK Merauke sebesar Rp.8.954.090.000 yang terdiri dari :

1. Realisasi Belanja Per Sumber Dana

Realisasi Belanja per sumber dana dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.36

Realisasi Belanja Per Sumber Dana

NO	JENIS BELANJA	PAGU TOTAL	PAGU EFEKTIF	REALISASI	PERSENTASE BERDASARKAN PAGU TOTAL	PERSENTASE BERDASARKAN PAGU EFEKTIF
1	Belanja Pegawai	5.466.116.000	5.466.116.000	5.255.305.602	96,14%	96,14 %
2	Belanja Barang	5.395.887.000	3.446.672.000	3.440.476.428	63,76%	99,82 %
3	Belanja Modal	41.302.000	41.302.000	40.459.500	97,96%	97,96 %
	Persentase Keseluruhan	10.903.305.000	8.954.090.000	8.736.241.530	80,12%	97,57 %

Data dari grafik menunjukkan bahwa realisasi belanja modal (97,96%) paling tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai (96,14%) dan lebih rendah dari realisasi belanja barang (99,82%)

2. Persentase Realisasi Anggaran Perbulan

Persentase realisasi anggaran perbulan dapat dilihat pada tabel:

Tabel 3.37
Persentase Realisasi Anggaran Perbulan

No	Bulan	Pagu		Realisasi	Persentase	
		SPAN	SAKTI		SPAN	SAKTI
1	Januari	10.857.593.000	10.158.325.000	294.247.564	2,71%	2,90%
2	Februari	10.857.593.000	8.795.678.000	547.499.484	5,04%	6,22%
3	Maret	10.857.593.000	8.795.678.000	1.041.099.813	9,59%	11,84%
4	April	10.857.593.000	8.795.678.000	760.630.645	7,01%	8,65%
5	Mei	10.857.593.000	8.795.678.000	769.485.592	7,09%	8,75%
6	Juni	10.857.593.000	8.795.678.000	886.678.733	8,17%	10,08%
7	Juli	10.857.593.000	8.908.378.000	637.703.668	5,87%	7,16%
8	Agustus	10.857.593.000	8.908.378.000	639.714.406	5,89%	7,18%
9	September	10.857.593.000	8.908.378.000	657.892.689	6,06%	7,39%
10	Oktober	10.903.305.000	8.954.090.000	733.781.128	6,73%	8,19%
11	November	10.903.305.000	8.954.090.000	662.453.141	6,08%	7,40%
12	Desember	10.903.305.000	8.954.090.000	1.103.306.190	10,12%	12,32%
Jumlah		10.903.305.000	8.954.090.000	8.736.241.530	80,12%	97,57%

Grafik 3.24
Realisasi Anggaran Tahun 2025

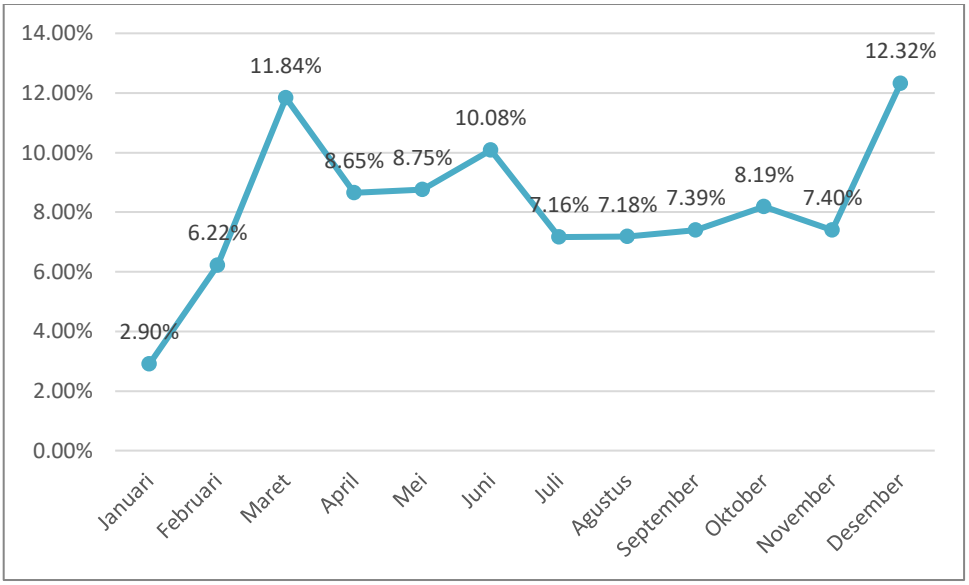

Dari grafik dapat dilihat bahwa realisasi terendah pada bulan Januari (2,90%) dan realisasi anggaran tertinggi pada bulan Desember (12,32%),

3. Realisasi Anggaran Menurut Rincian Output (KRO)/rincian Output (RO) tahun 2025

Tabel 3.38
Tabel realisasi anggaran menurut rincian output (KRO/RO)

No	Kegiatan	Belanja		
		Anggaran	Realisiasi	Persen
1	**QAA.012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas**	10.200.000	10.200.000	100,00 %
2	QAH.016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	80.400.000	80.399.800	100,00 %
3	QAH.017 Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	26.990.000	26.990.000	100,00 %
4	QAH.U02 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	28.160.000	28.160.000	100,00 %
5	QAH.U03 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di PLBN	10.560.000	10.360.000	98,11%
6	QAH.U04 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	128.000.000	127.920.000	99,94%
7	QAH.U07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	21.455.000	21.455.000	100,00 %
8	QAH.U08 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	33.912.000	33.902.000	99,97%
9	QAH.U09 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	6.748.000	6.598.000	97,78%
10	QAH.U10 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	2.640.000	2.640.000	100,00 %
11	QAH.U11 Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	7.140.000	7.140.000	100,00 %
12	QAH.U12 Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	35.566.000	35.566.000	100,00 %
13	QAH.U13 Layanan survei faktor risiko penyakit diare	21.420.000	21.420.000	100,00 %
14	QAH.U14 Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	6.570.000	6.566.500	99,95%
15	QAH.U15 Layanan survei faktor risiko penyakit TB	48.870.000	48.870.000	100,00 %

16	QAH.U19 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan	69.700.000	69.700.000	100,00 %
17	QAH.U20 Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	8.835.000	8.750.000	99,04%
18	RAB.001 Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	149.071.000	148.366.724	99,53%
19	CAN.001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	31.302.000	31.135.500	99,47%
20	EBA.956 Layanan BMN	31.140.000	31.140.000	100,00 %
21	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	28.245.000	28.220.000	99,91%
22	EBA.962 Layanan Umum	38.310.000	38.023.542	99,25%
23	EBA.994 Layanan Perkantoran	7.993.766.000	7.780.874.179	97,34%
24	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggara	46.710.000	43.839.301	93,85%
25	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluas	57.240.000	56.951.944	99,50%
26	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	31.140.000	31.053.040	99,72%
	Jumlah	**8.954.090.000**	**8.736.241.530**	**97,57%**

4. Realisasi Anggaran Menurut Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025

Tabel 3.39

Realisasi anggaran menurut indikator kinerja Kegiatan Tahun 2025

NO	OUTPUT	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	**Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pelabuhan/Bandara/PLBDN dan Wilayah**			
a.	Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	**279.903.000**	**279.804.300**	99,96%
b.	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	**236.420.000**	**236.140.000**	99,88%
c.	Indeks Pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN	**30.843.000**	**30.693.000**	99,51%
2	**Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada**			
d.	Nilai kinerja anggaran	**218.521.000**	**217.530.266**	99,55%
e.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	**7.993.766.000**	**7.780.874.179**	97,34%
f.	Kinerja implementasi WBK satker	**59.547.000**	**59.355.500**	99,68%
g.	Perentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	0,00%
h.	Persentase realisasi anggaran	**135.090.000**	**131.844.285**	97,60%
	Total	**8.954.090.000**	**8.736.241.530**	97,57%

Tabel diatas menunjukkan persentase realisasi anggaran tertinggi pada Indeks deteksi faktor risiko di Pelabuhan/Bandara/PLBDN sebesar

99,96% dan realisasi anggaran terendah pada indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebesar 97,34%%.

C. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Perbandingan Nilai BMN Pada Laporan Barang Dan Laporan Keuangan Nilai BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke per 30 Desember 2025 adalah sebesar Rp**37.676.681.785** (tiga puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40
Neraca sarana dan prasarana

NO	Uraian Neraca	IntraKomptabel (Rp)	%	EkstraKomptabel (Rp)	%	Gabungan (Rp)	%
I	**Aset Lancar**						
1	Persediaan	205.063.960	100	0	0	205.063.960	100
	Sub Jumlah	**205.063.960**	**100**	**0**	**0**	**205.063.960**	**100**
II	**Aset Tetap**						
1	Tanah	6.129.239.000	100	0	0	6.129.239.000	100
2	Peralatan dan Mesin	17.680.516.581	99,90	18.583.442	0,10	17.699.100.023	100
3	Gedung dan Bangunan	13.643.278.802	100	0	0	13.643.278.802	100
	Sub Jumlah	**37.453.034.383**	**99,95**	**18.583.442**	**0,10**	**37.471.617.825**	**100**
III	**Aset Lainnya**						
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0	0	0	100
	Sub Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
	Total	**37.658.098.343**	**99,95**	**18.583.442**	**0,05**	**37.676.681.785**	**100**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke memiliki 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan seluruh indikator telah mencapai/melampaui target yang telah ditentukan..
2. Rata-rata capaian indikator tahun 2025 adalah sebesar 109% lebih tinggi dari rata-rata capaian indikator tahun 2024 sebesar 108%.
3. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mendapat dukungan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 8.954.090.000 dari total anggaran yang terealisasi sebesar Rp.8.736.241.530 (97,57%).
4. Berdasarkan perhitungan Nilai Efisiensi Angaran, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 97,57% Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dapat mencapai rata-rata target indikator sebesar 109%.

Pencapaian target kinerja dan anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke tahun 2025 merupakan hasil kerja keras dari seluruh pegawai anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke, capaian ini juga tidak lepas dari dukungan dan pendampingan unit utama Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Inspektorat Jenderal Kemenkes, Lintas sektor dan lintas program terkait.

B. Tindak Lanjut

Menindaklanjuti realisasi kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025 ada beberapa hal yang harusdilakukan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di tahun berikutnya yaitu :

1. Wilayah kerja Pelabuhan Laut Wanam belum memiliki lahan dan bangunan agar diusul alokasi anggaran pengadaan lahan dan bangunan kantor untuk wilayah kerja Pelabuhan Laut Wanam di tahun anggaran 2027
2. Melakukan usulan penerimaan CPNS untuk mengatasi keterbatasan SDM

di wilayah kerja.

3. Meningkatkan upaya Inovasi dari berbagai kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIF ABUBAKAR KATILI, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yudhi Pramono, MARS
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
dr. Yudhi Pramono, MARS	**Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si., M.K.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
A	**Sasaran Strategis (08)**		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah	40 Persen
1	**Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah**		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0.99 Indeks
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100 Persentase
		Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0.92 Indeks
B	**Sasaran Strategis (17)**		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	**Program Dukungan Manajemen**		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	**Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan	Nilai kinerja anggaran	87 Angka
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95 Angka

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
	Pengendalian Penyakit	Kinerja Implementasi WBK Satker	80 Angka
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80 Persentase
		Persentase realisasi anggaran	96 Persentase

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1,611,897,000.00
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9,245,696,000.00
TOTAL			10,857,593,000.00

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua

dr. Yudhi Pramono, MARS

Pihak Pertama

Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si., M.K.M.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIF ABUBAKAR KATILI, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Murti Utami, MPH
Jabatan : Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
drg. Murti Utami, MPH	**Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si., M.K.M.**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
A	**Sasaran Strategis (08)**		
	Menguatnya surveilans yang adekuat	Presentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	80 Persen
I	**Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**		
	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor resiko kesehatan yang berpotensi KLB/ wabah	40 Persen
1	**Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah**		
	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0.99 Indeks
		Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	100 Persentase
		Indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan/bandara/PLBDN	0.92 Indeks
B	**Sasaran Strategis (17)**		
	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	90 Indeks
I	**Program Dukungan Manajemen**		
	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	95 Nilai
		Nilai Reformasi Birokrasi	98 Nilai
		Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	96 Persen
1	**Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**		
	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan	Nilai kinerja anggaran	87 Angka
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95 Angka

No	Sasaran Strategis/Program/ Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK 2025
1	2	3	4
	Pengendalian Penyakit	Kinerja Implementasi WBK Satker	80 Angka
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80 Persentase
		Persentase realisasi anggaran	96 Persentase

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	696,237,000
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	8,257,853,000
TOTAL			8,954,090,000

Jakarta, 22 Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

drg. Murti Utami, MPH

Syarif Abubakar Katili, S.H., M.Si., M.K.M.